

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH  
(Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara)**



**TESIS**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi  
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

PUDJI SUPRAJITNO  
C4B001133

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2003**

**TESIS**  
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**  
**KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH**  
**(Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara)**

disusun Oleh

Pudji Suprajitno  
C4B001133

telah dipresentasikan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 8 Oktober 2003  
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama



Drs. Syuhada Sofian, MSIE

Pembimbing Pendamping

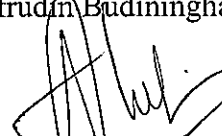


Firmansyah, SE, MSi

Anggota Penguji



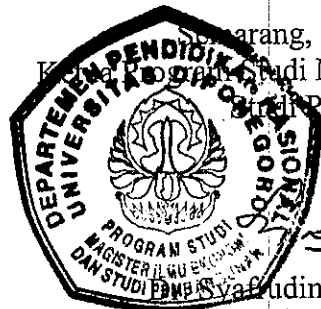
Dr. Syafrudin Budiningharto, SU



Dra. Hemiwati RH., MS



Dr. Dwisetia Puerwono, MSc



Surabaya, 8 Oktober 2003

Pudji Suprajitno, M. Sc.  
Studi Magister Ilmu Ekonomi dan  
Studi Pembangunan

Pudji Suprajitno, M. Sc.

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/ tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Oktober 2003



Pudji Suprajitno

## ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan pertama untuk menganalisis besarnya tingkat ketergantungan fiskal antara Kabupaten Banjarnegara dengan pemerintah pusat dilihat dari derajat desentralisasi fiskal daerah. Kedua menganalisis pengaruh pendapatan per kapita, pertumbuhan sektor ekonomi dominan dalam PDRB (pertanian; industri; perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa) dan bantuan pemerintah pusat terhadap derajat kemandirian fiskal (DKF).

Penelitian ini menggunakan data sekunder (time series) dari tahun 1977 s/d 2000. Data ini dianalisis dengan metode Partial Adjustment Model (PAM).

Dari hasil penelitian ini didapatkan sebagai berikut : bahwa tingkat ketergantungan fiskal antara Kabupaten Banjarnegara dengan pemerintah pusat cukup besar, hal ini ditandai dari proporsi sumbangan dan bantuan (S/B) terhadap total penerimaan daerah (TPD) sebesar 74,21 %. Disisi lain kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) maupun bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) terhadap TPD sangat rendah yaitu masing-masing sebesar 16,41 % dan 9,38 %. Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Banjarnegara ditinjau dari derajat desentralisasi fiskal ternyata masih kurang. Selanjutnya dari hasil regresi diperoleh bahwa pendapatan per kapita mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap DKF dengan elastisitas jangka pendek dan jangka panjang sebesar 0,162 dan 0,182. Pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap DKF dengan elastisitas jangka pendek dan jangka panjang sebesar 0,011 dan 0,012. Pertumbuhan sektor industri mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap DKF dengan elastisitas jangka pendek dan jangka panjang sebesar 0,0008 dan 0,0009. Pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap DKF dengan elastisitas jangka pendek dan jangka panjang sebesar -0,0038 dan -0,0043. Pertumbuhan sektor jasa-jasa mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap DKF dengan elastisitas jangka pendek dan jangka panjang sebesar 0,011 dan 0,012. Bantuan pemerintah pusat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap DKF dengan elastisitas jangka pendek dan jangka panjang sebesar -0,183 dan -0,206. Berdasarkan hasil diatas didapat kesimpulan bahwa semua variabel berpengaruh dan signifikan terhadap DKF, namun perlu dicermati pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yang berpengaruh negatif.

Berdasarkan temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah faktor penting untuk meningkatkan DKF. Dari sudut pandang anggaran dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah harus melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menggunakan anggaran secara efisien, serta secara bertahap mengurangi ketergantungan fiskal dari pemerintah pusat.

## ABSTRACT

This research aim firstly to analyze the size of regional fiscal dependency of Banjarnegara county on central government in terms of the degree of fiscal decentralization. Secondly to analyze the impacts of per capita income, Gross Regional Domestic Product (GRDP) growth of dominant economic sectors (i.e. agriculture, industry, trade, hotel & restaurant, and services), and central government aids on the degree of self-sufficiency regional fiscal.

This study use time series data from 1977 to 2000. The data have been analyzed by Partial Adjustment Model (PAM).

The findings of this research are as follows : the degree of fiscal dependency of Banjarnegara county on central government is large, this has been shown by the fact that the proportion of central government aids to regional total revenues is relatively large, i.e. 74.21%. On the other hand, the financial capacity of local government that is reflected by the degree of fiscal decentralization is low, this is shown by small contribution of both PAD (regional revenues) and BHPBP (tax sharing and non tax) to regional total revenues (TPD), i.e. 16.41% and 9.38% respectively. Based on the above results we can conclude that monetary ability of Banjarnegara county is still less. In addition from the result of regression analysis per capita income have positive influence and significant to DKF with short term elasticity and long term elasticity are 0,162 and 0,182 respectively. Growth of agricultural sector have positive effect on DKF significantly, where short term elasticity and long term elasticity are 0,011 and 0,012 respectively. Growth of industrial sector have positive effect on DKF significantly, where short term elasticity and long term elasticity are 0,0008 and 0,0009 respectively. Growth of trade, hotel and restaurant sector have negative effect on DKF significantly, where short term elasticity and long term elasticity are -0,0038 and -0,0043 respectively. Growth of services sector have positive effect on DKF significantly, where short term elasticity and long term elasticity are 0,011 and 0,012 respectively. Aid central government have negative effect on DKF significantly, where short term elasticity and long term elasticity are -0,183 and -0,206 respectively. Based on the above results we can conclude that all of the variables influence DKF significantly, but we should give more attention to trade, hotel and restaurant sector because their negative effect on DKF.

Based on the reseach findings it can be concluded that economic growth is the important factor for the region to improve its DKF. From the budget point of view it can be concluded that the county government have to intensify and extensify in order to increase government revenue, to expend the budget efficiently, and to decrease the finance dependency on central government gradually.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan hidayah dan rahmat-Nya sehingga tugas penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Maksud penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan pada Program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga tulisan ini dapat tersusun, terutama kepada :


1. Ketua Program beserta seluruh civitas akademika Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Drs. Syuhada Sofian, MSIE dan Bapak Firmansyah, SE. MSi., selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak Bupati Banjarnegara beserta jajarannya, khususnya Bagian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pusat Statistik dan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
5. Bapak H. Mardiyanto, selaku Gubernur Propinsi Jawa Tengah.
6. Bapak Ir. Eddy Haryono, Dipl. Eng., selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Tengah.

7. Bapak Widadi, SH., selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah.
8. Istri dan ananda tercinta yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
9. Rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini terdapat kekurangan-kekurangan, meskipun sudah diupayakan secara optimal. Untuk itu segala kritik dan atau saran terhadap tulisan ini dengan senang hati diterima demi penyempurnaan sajian dikemudian hari.

Semarang, Oktober 2003

Penyusun,



Pudji Suprajitno

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL.....  | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....   | ii   |
| PERNYATAAN.....   | iii  |
| ABSTRAKSI.....  | iv   |
| <i>ABSTRACT</i> .....   | v    |
| KATA PENGANTAR.....   | vi   |
| DAFTAR ISI.....   | viii |
| DAFTAR TABEL.....   | xi   |
| DAFTAR GAMBAR.....  | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN.....  | xiv  |
| <br>  |      |
| BAB I PENDAHULUAN.....  | 1    |
| 1.1. Latar Belakang.....  | 1    |
| 1.2. Rumusan Masalah.....                                       | 13   |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....                         | 14   |
| <br>  |      |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN<br>TEORITIS..... | 16   |
| 2.1. Tinjauan Pustaka.....                                      | 16   |
| 2.1.1. Peranan Pemerintah.....                                  | 16   |
| 2.1.2. Penerimaan Pemerintah.....                               | 18   |
| 2.1.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.....               | 20   |
| 2.1.4. Sistem Hubungan Keuangan Pusat-Daerah.....               | 22   |
| 2.1.5. Otonomi Daerah dan Sistem Desentralisasi.....            | 25   |
| 2.1.6. Desentralisasi Fiskal Daerah.....                        | 28   |
| 2.1.7. Kemandirian Fiskal Daerah/Otonomi Fiskal Daerah.....     | 29   |
| 2.1.8. Transfer Pemerintah Pusat.....                           | 31   |
| 2.1.9. Pembangunan Ekonomi Daerah.....                          | 34   |
| 2.1.10. Pertumbuhan Ekonomi.....                                | 35   |
| 2.1.11. Pendapatan per Kapita.....                              | 37   |
| 2.1.12. Pendapatan Asli Daerah.....                             | 38   |
| 2.1.13. Penelitian Terdahulu.....                               | 41   |
| 2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis.....                           | 45   |
| 2.3. Hipotesis.....   | 46   |
| <br>  |      |
| BAB III METODE PENELITIAN.....                                  | 48   |
| 3.1. Jenis dan Sumber Data.....                                 | 48   |
| 3.2. Metode Pengumpulan Data.....                               | 49   |
| 3.3. Teknik Analisis.....                                       | 49   |
| 3.3.1. Analisis Diskriptif.....                                 | 49   |
| 3.3.2. Analisis Regresi Linier Berganda.....                    | 51   |

|  |        |
|--|--------|
| BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN .....  | 63     |
| 4.1. Keadaan APBD Kabupaten Banjarnegara .....   | 63     |
| 4.1.1. Perkembangan APBD .....   | 63     |
| 4.1.2. Kontribusi PAD Terhadap APBD .....  | 64     |
| 4.1.3. Kontribusi Sumbangan dan Bantuan Terhadap APBD .....  | 66     |
| 4.2. Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) Kabupaten Banjarnegara .....                                     | 68     |
| 4.3. Diskripsi Sektor-Sektor Dominan Dalam PDRB Kabupaten Banjarnegara .....                               | 71     |
| 4.3.1. Sektor Pertanian .....  | 71     |
| 4.3.2. Sektor Industri .....   | 71     |
| 4.3.3. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran .....  | 72     |
| 4.3.4. Sektor Jasa-Jasa .....  | 72     |
| 4.4. Perkembangan Pendapatan per Kapita.....   | 72     |
| <br>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....   | <br>74 |
| 5.1. Analisis Deskriptif .....   | 74     |
| 5.2. Hasil Estimasi Model Regresi Dinamis .....  | 79     |
| 5.3. Pengujian Terhadap Asumsi Klasik .....  | 80     |
| 5.3.1. Uji Multikolinearitas.....  | 80     |
| 5.3.2. Uji Heteroskedastisitas .....   | 82     |
| 5.3.3. Uji Autokorelasi.....   | 83     |
| 5.3.4. Uji Normalitas.....   | 83     |
| 5.4. Pengujian Goodness of Fit Model .....   | 84     |
| 5.4.1. Pengujian Secara Individual.....  | 84     |
| 5.4.2. Pengujian Secara Serentak.....  | 86     |
| 5.4.3. Koefisien Determinan .....  | 86     |
| 5.5. Pembahasan.....   | 86     |
| 5.5.1. Pengaruh Pendapatan per Kapita terhadap Derajat Kemandirian Fiskal .....                            | 88     |
| 5.5.2. Pengaruh Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap Derajat Kemandirian Fiskal .....                     | 88     |
| 5.5.3. Pengaruh Pertumbuhan Sektor Industri terhadap Derajat Kemandirian Fiskal .....                      | 89     |
| 5.5.4. Pengaruh Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran terhadap Derajat Kemandirian Fiskal ..... | 89     |
| 5.5.5. Pengaruh Pertumbuhan Sektor Jasa-jasa terhadap Derajat Kemandirian Fiskal .....                     | 90     |
| 5.5.6. Pengaruh Bantuan dari Pemerintah Pusat terhadap Derajat Kemandirian Fiskal .....                    | 90     |
| 5.5.7. Interpretasi Koefisien Penyesuaian .....  | 91     |
| <br>BAB VI PENUTUP.....  | <br>92 |
| 6.1. Kesimpulan.....   | 92     |
| 6.2. Saran .....   | 94     |

|                        |    |
|------------------------|----|
| DAFTAR REFERENSI ..... | 95 |
| LAMPIRAN               |    |
| BIODATA                |    |

## DAFTAR TABEL

|  | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1.1. Keuangan Pusat-Daerah di Beberapa Negara (dalam persen).....  | 4       |
| Tabel 1.2. Distribusi Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten/ Kota se Indonesia (dalam persen) .....  | 5       |
| Tabel 1.3. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota se Propinsi Jawa Tengah (dalam ribuan rupiah)..... | 7       |
| Tabel 1.4. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (dalam ribuan rupiah).....   | 8       |
| Tabel 1.5. Perkembangan Relatif Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 1997-2000 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (dalam rupiah)..... | 10      |
| Tabel 1.6. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjarnegara Atas Dasar Tahun 1993 (dalam %).....   | 11      |
| Tabel 1.7. Perkembangan Pendapatan per Kapita Kabupaten Banjarnegara Tahun 1997 s/d 2000 .....   | 12      |
| Tabel 4.1. Perkembangan APBD Kabupaten Banjarnegara .....  | 64      |
| Tabel 4.2. Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Banjarnegara.....  | 65      |
| Tabel 4.3. Kontribusi Sumbangan dan Bantuan terhadap APBD .....  | 66      |
| Tabel 4.4. Perkembangan Tranfer (Sumbangan/Bantuan ) dari Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Banjarnegara.....   | 67      |
| Tabel 4.5. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banjarnegara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (dalam ribuan rupiah).....         | 70      |
| Tabel 4.6. Perkembangan Pendapatan per Kapita Kabupaten Banjarnegara Tahun 1997 s/d 2000 .....   | 72      |

|  |    |
|--|----|
| Tabel 5.1. Rekapitulasi perhitungan Derajat Desantralisasi Fiskal Kabupaten Banjarnegara tahun 1977/1978 s/d 2000 (dalam persen) ..... | 75 |
| Tabel 5.2. Hasil Estimasi Model PAM.....   | 79 |
| Tabel 5.3. Perbandingan Nilai $R^2$ .....  | 81 |
| Tabel 5.4. Pengujian Multikolinieritas.....  | 81 |
| Tabel 5.5. Nilai t hitung.....   | 85 |
| Tabel 5.6. Hasil Estimasi Parameter Pertumbuhan Jangka Panjang.....  | 87 |

## DAFTAR GAMBAR

|  | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 2.1. Sistem Perekonomian Unsur Pemerintah.....                  | 17      |
| Gambar 2.2. Arus Lingkar Pemungutan Pajak.....                         | 18      |
| Gambar 2.3. Kerangka Hubungan Keuangan Pusat Daerah.....               | 23      |
| Gambar 2.4. Akumulasi Model dan Pertumbuhan Ekonomi .....              | 36      |
| Gambar 5.1. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Banjarnegara ..... | 77      |
| Gambar 5.2. Uji Heteroskedastisitas.....                               | 82      |

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Analisis Tipologi Klassen yang menggambarkan kondisi Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah
- Lampiran 2 Data APBD, PAD, BHPBP, Sumbangan dan Bantuan Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 1977/1978 s/d 2000
- Lampiran 3 Data APBD, PAD, Bantuan, Sumbangan dan Bantuan Kabupaten Banjarnegara Tahun 1977 s/d 2000 berdasarkan tahun kalender
- Lampiran 4 Data Sektor Pertanian; Sektor Industri; Sektor Perdagangan, hotel dan restoran serta Sektor Jasa-Jasa dalam PDRB Kabupaten Banjarnegara Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1975, 1983 dan 1993 (dalam rupiah)
- Lampiran 5 Data Sektor Pertanian; Sektor Industri; Sektor Perdagangan, hotel dan restoran serta Sektor Jasa-Jasa dalam PDRB Kabupaten Banjarnegara Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (dalam rupiah)
- Lampiran 6 Data Pendapatan per kapita Kabupaten Banjarnegara
- Lampiran 7 Data dan Print Out Analisis Regresi DKF Kabupaten Banjarnegara

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam menghadapi era globalisasi perdagangan bebas, isu mengenai kemandirian daerah dalam mengelola pembangunan telah mendapat banyak perhatian dari berbagai kalangan. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran pada daerah-daerah, baik propinsi maupun kabupaten/ kota yang selama ini memiliki ketergantungan tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat untuk mendanai kegiatan pembangunan. Dengan diberlakukan otonomi daerah sejak 1 Januari 2001 membawa dampak adanya perubahan sistem fiskal termasuk diantaranya mengubah hubungan antara tingkat pemerintah dalam bidang fiskal dimana hingga saat ini masih menjadi isu pokok penting.

Salah satu alasan penyelenggaraan otonomi daerah adalah agar pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan di pusat. Ini merupakan bentuk koreksi atas pelaksanaan pembangunan yang selama ini kebijakannya bersifat sentralistik dan kurang memperhatikan daerah. Dengan kebijakan yang sentralistik ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dan ketidakseimbangan pelaksanaan pembangunan di pusat dan di daerah. Dampak dari kesenjangan ini mengakibatkan hampir seluruh potensi pembangunan di daerah tersedot ke pusat sehingga daerah tidak mampu berkembang secara memadai. Jadi dalam otonomi daerah terkandung maksud memberikan peluang dan kebebasan

kepada daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri (M. Irsad dan Sri Sudarsi., 2001).

Dalam rangka mencapai tujuan desentralisasi secara benar, tepat, bermanfaat dan berkelanjutan, pemerintah pusat berusaha mengembangkan otonomi daerah. Landasan konstitusionalnya diambil pada penjelasan pasal 18 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administarsi belaka, seluruhnya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Guna mengakomodasikan tuntutan perubahan tersebut, negara menerbitkan undang-undang baru yakni UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dengan didukung perangkat hukum fiskal yakni UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Beberapa pedoman dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah memperhatikan aspek demokrasi keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaannya berdasar otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
- c. Otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada Dati II, sedangkan otonomi yang terbatas diletakkan pada propinsi (propinsi bukan atasan kabupaten/ kota).
- d. Sesuai konstitusi dan keserasian pusat, daerah dan antar daerah.
- e. Wilayah administrasi dan kawasan pembinaan khusus dihapus.
- f. Meningkatkan peran legislasi, pengawas maupun fungsi anggaran.

- g. Asas dekonsentrasi dilaksanakan pada daerah propinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi.
- h. Asas tugas pembantuan dimungkinkan.

Sementara tujuan pokok UU Nomor 25 Tahun 1999 adalah memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah serta menciptakan sistem pembiayaan yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab. Selain itu juga untuk mewujudkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dan menjadi acuan dalam alokasi penerimaan negara.

Strategi kebijakan pemerintah untuk mengembangkan otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 – 2004 adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah.
- b. Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.
- c. Program penataan pengelolaan keuangan daerah.
- d. Program penguatan lembaga non pemerintah.

Tuntutan akan dilaksanakan otonomi daerah dengan titik berat kepada pemerintah kabupaten/ kota sudah bergulir, persoalan yang muncul adalah seberapa jauh pemerintah daerah mampu membangun aspek-aspek dasar yang menjadi tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya dalam menggali kemampuan keuangan daerah. Namun proses transisi otonomi daerah yang disertai dengan desentralisasi fiskal di Indonesia menghadapi kondisi yang kurang

menguntungkan karena terjadi seiring dengan krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi pada medio 1997 dan dampaknya hingga saat ini masih terasa.

Menurut Faisal Basri (Jaka Sriyana, 1999) bahwa belakangan ini ada kecenderungan yang terjadi di seluruh dunia akan tuntutan terhadap peningkatan kewenangan daerah dalam melaksanakan kebijakan ekonomi. Tuntutan ini tentu saja didukung oleh alasan bahwa permasalahan yang terjadi di daerah sedemikian kompleks dan multidimensional sehingga tidak mungkin diatasi dengan suatu terapi yang bersifat terpusat. Sedikit menyimak gambaran tentang hubungan keuangan pusat daerah di Indonesia dan beberapa negara lain sebagaimana terlihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Keuangan Pusat-Daerah di beberapa Negara**  
**(dalam persen)**

| Negara    | Porsi daerah dalam Pengeluaran Pemerintah Pusat | Porsi Daerah dalam Penerimaan Pemerintah Pusat | Penerimaan / Pengeluaran Pemda |
|-----------|---|--|--------------------------------|
| Indonesia | 22  | 7  | 30                             |
| Cina      | 64  | 64   | 100                            |
| Korea     | 38  | 18   | 48                             |
| India     | 54  | 35   | 60                             |
| Argentina | 37  | 35   | 65                             |
| Brasil    | 37  | 22   | 76                             |
| Kolombia  | 32  | 18   | 56                             |

Sumber : Jaka Sriyana, 1999

Dari tabel 1.1 tersebut diatas dapat dilihat betapa terpusatnya kondisi keuangan di Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain yang tersebut diatas, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang sistem keuangannya terpusat.

Angka ketergantungan fiskal menunjukkan betapa kuatnya peran pemerintah pusat dalam alokasi anggaran dibandingkan pemerintah daerah. Menurut Elia Radianto (1997) didalam penelitiannya menyimpulkan bahwa peran bantuan pemerintah pusat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang berpengaruh positif terhadap derajat kemandirian fiskal daerah/ derajat otonomi fiskal daerah. Angka ini dapat dilihat dari porsi bantuan pemerintah pusat kepada masing-masing daerah yang diperlihatkan pada tabel 1.2 dalam distribusi realisasi penerimaan daerah kabupaten/ kota se Indonesia sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Distribusi Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten/ Kota se Indonesia**  
**(dalam persen)**

| Jenis Penerimaan                                 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000  |
|--|-----------|-----------|-----------|-------|
| Sisa Anggaran Tahun Lalu                         | 2,97      | 2,40      | 3,79      | 3,85  |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD)                     | 13,25     | 11,42     | 9,88      | 8,66  |
| Bagian Daerah (Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak) | 15,19     | 13,12     | 11,88     | 10,83 |
| Sumbangan dan Bantuan                            | 67,70     | 71,88     | 74,09     | 76,25 |
| Pinjaman Daerah                                  | 0,89      | 1,01      | 0,37      | 0,41  |
| Total Penerimaan                                 | 100       | 100       | 100       | 100   |

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemda Tingkat II se Indonesia beberapa terbitan.

Dari Tabel 1.2 terlihat bahwa porsi sumbangan dan bantuan dibandingkan dengan yang lain paling tinggi yakni rata-rata sebesar 70,05 persen. Di sisi lain kontribusi PAD dibandingkan dengan keseluruhan penerimaan daerah, menunjukkan begitu rendahnya kemampuan pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam memenuhi kebutuhan dibandingkan dengan kemampuannya yakni dibawah 14 persen. Dengan demikian realitas hubungan keuangan pusat dan daerah

ditandai masih besarnya peran pemerintah pusat dalam alokasi anggaran dibanding pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber penerimaan daerah.

Masih rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber penerimaan daerah, pada tabel 1.3 di halaman berikut ini diperlihatkan rasio pendapatan asli daerah (PAD) dengan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk 35 kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Tengah. Data yang tersaji pada tabel 1.3 menggambarkan rasio PAD dengan APBD untuk 35 kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Tengah yang dilihat dari angka-angkanya ternyata memiliki keragaman di mana siap tidak siap harus menghadapi otonomi daerah.

Selama kurun waktu tahun anggaran 1999/2000 s/d 2000 kabupaten Banjarnegara memiliki kemampuan keuangan yang lebih rendah dibanding kabupaten/ kota yang ada di Propinsi Jawa Tengah yaitu di urutan ke-34 dan disusul kabupaten Klaten pada urutan ke-35 (terakhir). Dari dua kabupaten tersebut dipilih kabupaten Banjarnegara hal ini mengingat kabupaten Banjarnegara lebih stagnan dibanding dengan kabupaten Klaten yang letak wilayahnya diapit dua kota besar yakni Yogyakarta dan Surakarta. Indikasi ini terlihat dari perolehan PAD kabupaten Banjarnegara yang lebih lebih rendah dibanding dengan kabupaten Klaten.

Kemudian untuk lingkup wilayah karesidenan Banyumas yang terdiri dari kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga dan Banjarnegara, ternyata kabupaten Banjarnegara memiliki kemampuan keuangan yang paling rendah.

**Tabel 1.3**  
**Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja**  
**Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota se Propinsi Jawa Tengah**  
**(dalam ribuan rupiah)**

| Kabupaten/<br>Kota | 1999/ 2000 |             |                     |     | 2000       |             |                     |     |
|--------------------|------------|-------------|---------------------|-----|------------|-------------|---------------------|-----|
|                    | PAD        | APBD        | PAD/<br>APBD<br>(%) | Urt | PAD        | APBD        | PAD/<br>APBD<br>(%) | Urt |
| <b>Kabupaten</b>   |            |             |                     |     |            |             |                     |     |
| 1.Cilacap          | 26.179.521 | 182.657.461 | 14,33               | 7   | 19.278.950 | 164.444.502 | 11,72               | 10  |
| 2.Banyumas         | 17.578.323 | 163.195.410 | 10,77               | 13  | 16.663.495 | 152.240.136 | 10,95               | 12  |
| 3.Purbalingga      | 6.152.350  | 85.456.829  | 7,20                | 29  | 6.010.601  | 89.141.224  | 6,74                | 30  |
| 4.Banjarnegara     | 5.457.020  | 95.271.150  | 5,73                | 34  | 4.769.553  | 89.124.200  | 5,35                | 34  |
| 5.Kebumen          | 7.663.304  | 129.691.790 | 5,91                | 33  | 6.310.219  | 116.453.653 | 5,42                | 33  |
| 6.Purworejo        | 7.177.769  | 103.707.873 | 6,92                | 30  | 9.029.511  | 103.948.671 | 8,69                | 21  |
| 7.Wonosobo         | 5.699.507  | 82.995.848  | 6,87                | 32  | 5.342.413  | 69.698.126  | 22,01               | 27  |
| 8.Magelang         | 10.726.896 | 111.190.910 | 9,65                | 15  | 11.946.612 | 118.121.969 | 10,11               | 16  |
| 9.Boyolali         | 10.096.450 | 107.125.677 | 9,42                | 17  | 9.511.129  | 94.716.736  | 10,04               | 18  |
| 10.Klaten          | 7.901.972  | 140.969.155 | 5,61                | 35  | 6.598.582  | 126.579.029 | 5,21                | 35  |
| 11.Sukoharjo       | 7.443.017  | 85.529.811  | 8,70                | 19  | 5.697.807  | 71.900.849  | 7,92                | 25  |
| 12.Wonogiri        | 10.837.763 | 137.118.447 | 7,90                | 23  | 10.366.133 | 119.735.851 | 8,66                | 22  |
| 13.Karanganyar     | 9.418.069  | 90.323.040  | 10,43               | 14  | 9.129.010  | 83.832.297  | 10,89               | 13  |
| 14.Sragen          | 8.532.369  | 97.290.456  | 8,77                | 18  | 8.876.265  | 96.921.353  | 9,16                | 20  |
| 15.Grobogan        | 9.097.199  | 131.887.304 | 6,90                | 31  | 8.016.315  | 115.518.410 | 6,94                | 29  |
| 16.Blora           | 7.465.166  | 99.012.174  | 7,54                | 26  | 6.689.751  | 89.374.597  | 7,49                | 28  |
| 17.Rembang         | 5.431.169  | 72.747.073  | 7,47                | 27  | 6.400.286  | 66.815.771  | 9,58                | 19  |
| 18.Pati            | 13.424.034 | 118.126.270 | 11,36               | 12  | 12.732.616 | 124.610.567 | 10,22               | 15  |
| 19.Kudus           | 11.897.881 | 80.471.378  | 14,79               | 6   | 11.141.390 | 64.315.420  | 17,32               | 3   |
| 21.Demak           | 6.222.379  | 79.220.734  | 7,85                | 24  | 5.012.974  | 83.496.343  | 6,00                | 32  |
| 20.Jepara          | 12.374.290 | 97.704.819  | 12,66               | 8   | 9.970.486  | 89.716.550  | 11,11               | 11  |
| 22.Semarang        | 12.069.291 | 98.660.853  | 12,23               | 9   | 11.002.410 | 85.203.891  | 12,91               | 7   |
| 23.Temanggung      | 6.180.431  | 71.684.441  | 8,62                | 20  | 5.179.897  | 77.540.904  | 6,68                | 31  |
| 24.Kendal          | 11.620.888 | 97.591.206  | 11,91               | 11  | 11.446.454 | 90.553.953  | 12,64               | 8   |
| 25.Batang          | 5.259.623  | 72.587.357  | 7,25                | 28  | 5.626.245  | 65.657.903  | 8,57                | 29  |
| 26.Pekalongan      | 9.144.149  | 76.369.433  | 11,97               | 10  | 9.179.822  | 76.628.418  | 11,98               | 9   |
| 27.Pemalang        | 7.951.555  | 102.402.259 | 7,77                | 25  | 6.912.367  | 81.504.296  | 8,48                | 24  |
| 28.Tegal           | 10.074.757 | 118.910.774 | 8,47                | 21  | 9.598.760  | 95.003.997  | 10,10               | 17  |
| 29.Brebes          | 9.904.399  | 120.533.084 | 8,22                | 22  | 10.504.914 | 101.482.432 | 10,35               | 14  |
| <b>Kota</b>        |            |             |                     |     |            |             |                     |     |
| 30.Magelang        | 7.960.315  | 33.201.482  | 23,98               | 2   | 6.950.533  | 32.692.088  | 21,26               | 2   |
| 31.Surakarta       | 19.029.095 | 122.884.848 | 15,49               | 5   | 21.098.150 | 129.368.770 | 16,31               | 4   |
| 32.Salatiga        | 5.750.716  | 33.203.723  | 17,32               | 4   | 5.435.736  | 37.967.434  | 14,32               | 6   |
| 33.Seamarang       | 57.185.997 | 203.031.772 | 28,17               | 1   | 48.741.406 | 222.957.529 | 21,86               | 1   |
| 34.Pekalongan      | 3.546.930  | 37.371.783  | 9,49                | 16  | 3.428.040  | 43.331.294  | 7,91                | 26  |
| 35.Tegal           | 8.042.959  | 46.429.117  | 17,32               | 3   | 6.765.212  | 41.907.650  | 16,14               | 5   |

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemda Tingkat II Jateng, dari beberapa terbitan, data diolah.

Selanjutnya dari hasil analisis Tipologi Klassen menggambarkan bahwa kabupaten Banjarnegara termasuk pada daerah relatif tertinggal (Lampiran 1). Hal inilah yang dijadikan alasan mengapa kabupaten Banjarnegara menjadi pilihan untuk dilakukan penelitian.

Kemudian bagi daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan cukup besar atau berada pada urutan atas barangkali tidaklah menjadi persoalan. Namun demikian pemerintah daerah bersangkutan tetap terus berupaya melakukan pengelolaan pada sektor-sektor ekonomi serta sumber daya manusia agar lebih efektif dan efisien serta produktif. Sedang bagi daerah yang berada di urutan bawah sudah barang tentu perlu melakukan pembenahan-pembenahan dan mencari sumber-sumber pendapatan baru, sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah bersangkutan.

Selanjutnya kondisi kemampuan keuangan dapat dilihat pada realisasi penerimaan pemerintah kabupaten Banjarnegara di tabel 1.4 sebagai berikut :

**Tabel 1.4**  
**Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara**  
**(dalam ribuan Rp.)**

| Penerimaan  | 1999/2000  |        | 2000       |        |
|---|------------|--------|------------|--------|
|   | Jumlah     | Persen | Jumlah     | Persen |
| Sisa anggaran tahun lalu  | 1.138.591  | 1,19   | 2.788.671  | 3.13   |
| Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD)                                   | 5.457.020  | 5,73   | 4.769.553  | 5.35   |
| Bagian Pendapatan dari Pemerintah dan atau Instansi yang lebih tinggi | 88.675.539 | 93,08  | 81.565.976 | 91.52  |
| Pinjaman Daerah   | -          | -      | -          | -      |
| Jumlah Penerimaan APBD  | 95.271.150 | 100    | 89.124.200 | 100    |

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemda Tk. II Jateng Tahun 1999/2000, 2000

Dari tabel 1.4 dapat dilihat bahwa dari sisi penerimaan APBD baik tahun anggaran 1999/2000 maupun 2000 ternyata pos PAD relatif sangat kecil yaitu 5 (lima) persen lebih, sementara pos bagian pendapatan dari pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi relatif sangat besar yaitu 90 % lebih. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan fiskal kabupaten Banjarnegara sangat rendah dan masih diperlukan ketergantungan dari pemerintah pusat.

Sementara gambaran perekonomian secara makro suatu daerah dapat diperlihatkan oleh nilai produk domestik regional bruto (PDRB), yang merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari sektor ekonomi yang berperan dalam kegiatan perekonomian daerah tersebut. PDRB kabupaten Banjarnegara yang juga cerminan ekonomi makro kabupaten Banjarnegara masih cukup stabil meskipun sempat terkena imbas krisis ekonomi nasional.

Kemudian struktur ekonomi kabupaten Banjarnegara diperlihatkan oleh perkembangan kontribusi sektor dalam pembentukan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 1993 yang dapat dilihat pada tabel 1.5. Perkembangan kontribusi sektor terhadap PDRB kabupaten Banjarnegara sebagaimana tersaji dalam tabel 1.5 memperlihatkan bahwa struktur ekonomi tergolong agraris, hal ini di tunjukan oleh kontribusi dari sektor pertanian rata-rata sebesar 42,09%.

Disisi lain sebagai daerah kabupaten yang memiliki potensi yang ditunjang oleh faktor geografis sektor industri juga berkontribusi tidak kecil dalam pembentukan PDRB, selama empat tahun sektor ini berkontribusi rata-rata sebesar 15,16%. Demikian juga untuk sektor jasa-jasa berkontribusi rata-rata

sebesar 14,91%. Di susul sektor perdagangan, hotel dan restoran rata-rata sebesar 12,61% dan sektor-sektor lainnya berkontribusi sebesar rata-rata di bawah 6%.

**Tabel 1.5**  
**Perkembangan Relatif Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Kabupaten**  
**Banjarnegara Tahun 1997 – 2000 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993**  
**(dalam Rupiah)**

| No. | Lapangan Usaha                  | 1997        | %     | 1998        | %     | 1999        | %     | 2000        | %     | Rata-rata (%) |
|-----|---------------------------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|
| 1   | Pertanian                       | 363.573.592 | 41.5  | 379.869.649 | 45.24 | 347.431.196 | 41.28 | 343.473.820 | 40.35 | 42.09         |
| 2   | Pertambangan dan Penggalian     | 4.215.485   | 0.48  | 4.432.888   | 0.53  | 4.532.888   | 0.54  | 4.556.055   | 0.54  | 0.52          |
| 3   | Industri                        | 141.689.877 | 16.17 | 125.537.743 | 14.95 | 124.769.472 | 14.82 | 124.966.864 | 14.68 | 15.16         |
| 4   | Listrik, Gas & Air Minum        | 2.767.582   | 6.32  | 3.039.359   | 0.36  | 3.331.872   | 0.40  | 3.815.764   | 0.45  | 1.88          |
| 5   | Bangunan                        | 48.870.347  | 5.59  | 47.575.155  | 5.67  | 46.837.082  | 5.56  | 47.630.171  | 5.60  | 5.61          |
| 6   | Perdagangan, Hotel & Restoran   | 113.537.520 | 12.90 | 108.013.994 | 12.86 | 104.359.413 | 12.40 | 104.588.839 | 12.29 | 12.61         |
| 7   | Angkutan                        | 37.752.494  | 4.31  | 36.220.235  | 4.31  | 41.103.773  | 4.88  | 38.758.915  | 4.55  | 4.51          |
| 8   | Bank & Lembaga Keuangan lainnya | 38.956.825  | 4.45  | 30.390.116  | 3.62  | 36.999.500  | 4.40  | 38.823.593  | 4.56  | 4.26          |
| 9   | Jasa-jasa                       | 123.713.125 | 14.12 | 105.668.734 | 12.58 | 134.217.533 | 15.95 | 144.605.085 | 16.99 | 14.91         |

Sumber : BPS, Banjarnegara dalam angka tahun 2001, data diolah.

Kemudian pertumbuhan ekonomi di perlihatkan dengan laju pertumbuhan PDRB, ini menggambarkan pertumbuhan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor yang berperan dalam kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Banjarnegara ditunjukkan dengan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993 yang dapat dilihat pada tabel 1.6.

Pada tabel 1.6 memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten Banjarnegara secara agregat mulai mengalami peningkatan yaitu dari 0,23 % pada tahun 1999 menjadi 1,13 % pada tahun 2000, dimana sebelumnya sempat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 1998 yaitu sebesar - 4,25 % yang di karenakan sebagai dampak adanya krisis ekonomi yang sedang berlangsung.

Secara umum pada tahun 2000 hampir semua sektor mengalami pertumbuhan positif, yang berarti terjadi peningkatan produksi barang dan jasa kecuali sektor pertanian dan sektor angkutan mengalami pertumbuhan negatif sebesar  $-1,14\%$  dan  $-5,70\%$ .

**Tabel 1.6**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Banjarnegara Atas Dasar tahun 1993**  
**(dalam %)**

| No. | Sektor                          | 1997        | 1998         | 1999        | 2000        |
|-----|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1   | Pertanian                       | 0,93        | 4,21         | -8,30       | -1,14       |
| 2   | Pertambangan dan Penggalian     | -6,98       | 5,16         | 2,26        | 0,59        |
| 3   | Industri                        | -1,79       | -11,40       | -0,61       | 0,16        |
| 4   | Listrik, Gas & Air Minum        | -2,65       | 9,82         | 9,62        | 14,52       |
| 5   | Bangunan                        | -20,70      | -2,65        | -1,55       | 1,09        |
| 6   | Perdagangan, Hotel & Restoran   | -2,57       | -4,86        | -3,38       | 0,22        |
| 7   | Angkutan                        | 28,72       | -4,06        | 13,48       | -5,70       |
| 8   | Bank & Lembaga Keuangan lainnya | 1,02        | -21,99       | 21,25       | 4,93        |
| 9   | Jasa-jasa                       | 11,42       | -14,6        | 27,02       | 7,74        |
|     | <b>PDRB</b>                     | <b>0,82</b> | <b>-4,15</b> | <b>0,23</b> | <b>1,13</b> |

Sumber : BPS, Banjarnegara dalam angka tahun 2001, data diolah.

Perkembangan ekonomi melalui sektor-sektor dalam PDRB pernah dilakukan penelitian oleh Elia Radianto (1997) yang menyimpulkan bahwa tingkat perkembangan ekonomi (sektor industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi) baik jangka pendek maupun jangka panjang mempunyai pengaruh positif terhadap derajat kemandirian fiskal daerah. Semakin tinggi perkembangan ekonomi suatu daerah semakin tinggi pula derajat kemandirian fiskal daerah.

Selanjutnya mengenai gambaran perkembangan pendapatan per kapita kabupaten Banjarnegara diperlihatkan pada tabel 1.7. Dari tabel 1.7 memperlihatkan bahwa persentase perkembangan pendapatan perkapita kabupaten

Banjarnegara mengalami peningkatan pada tahun 2000 yaitu sebesar 0,24 %, hal ini cukup baik mengingat sebelumnya masih mengalami pertumbuhan negatif, namun terjadi peningkatan sebesar -5,86 % pada tahun 1998 menjadi -0,09 % pada tahun 1999. Hal ini bisa dimaklumi karena adanya dampak krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 yang masih berlangsung.

**Tabel 1.7**  
**Perkembangan Pendapatan per Kapita Kabupaten Banjarnegara**  
**Tahun 1997-2000**

| Tahun | Pendapatan per Kapita<br>(dlm Rupiah) | Prosentase<br>Perkembangan (%) |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1996  | 1.009.398                             | -                              |
| 1997  | 1.005.544                             | -0,38                          |
| 1998  | 946.609                               | -5,86                          |
| 1999  | 945.750                               | -0,09                          |
| 2000  | 948.026                               | 0,24                           |

Sumber: BPS, Banjarnegara dalam angka Tahun 2001, data diolah

Berkaitan dengan perkembangan pendapatan per kapita, menurut Jaka Sriyana (1999) yang pernah melakukan penelitian menyimpulkan bahwa pendapatan per kapita dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PAD, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/ kota. Semakin tinggi pendapatan per kapita dan jumlah penduduk, semakin tinggi pula PAD yang diperoleh.

Dengan demikian dari gambaran yang telah diuraikan sebelumnya, maka sudah selayaknya pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara senantiasa berupaya mencari dan mengembangkan potensi daerah guna memenuhi kebutuhan pembiayaan baik rutin maupun pembangunan yang setiap tahunnya semakin meningkat. Lebih-lebih dalam era otonomi saat ini, tentunya berkait erat dengan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan otonomi itu sendiri agar

penyerahan tanggung jawab dalam mendukung terciptanya *good governance* dapat tercapai dan berhasil dengan baik.

Bertitik tolak dari gambaran dan uraian tersebut diatas, akan dilakukan suatu studi guna menganalisis seberapa besar tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Selain itu juga akan menganalisis pengaruh faktor-faktor internal perekonomian di kabupaten Banjarnegara terhadap derajat kemandirian fiskal daerah.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Kemandirian daerah kini merupakan suatu tuntutan yang tidak dapat dielakkan lagi mengingat dalam era globalisasi perdagangan bebas nanti, setiap daerah diharapkan mampu bersaing dengan daerah lain yang tersebar di seluruh belahan dunia, terutama dalam hal menggali sumber-sumber potensi baru di daerah guna meningkatkan PAD yang nantinya digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Proses penyelenggaraan pemerintahan baik rutin maupun pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Banjarnegara sudah barang tentu memerlukan biaya yang relatif besar, lebih-lebih dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang sudah digulirkan sejak awal tahun 2001. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah antara lain terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sehingga sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan salah satu tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Seperti terlihat pada tabel 1.3 perkembangan PAD kabupaten Banjarnegara pada tahun anggaran 1999/2000 dan 2000 dengan proporsi masing-masing 5,73 % dan 5,35 %. Realitas ini menunjukkan bahwa PAD belum menunjukkan perkembangan yang lebih baik dan kondisi kemampuan keuangan masih relatif rendah dibanding daerah lain. Selanjutnya apabila dibandingkan terhadap PAD kabupaten/ kota se Indonesia pada tahun anggaran yang sama yaitu masing-masing rata-rata sebesar 9,88 % dan 8,66 % (tabel 1.2) ternyata juga masih lebih rendah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka masalah penelitian ini dibatasi pada pertanyaan sebagai berikut :

- a. Seberapa besar tingkat ketergantungan fiskal antara pemerintah daerah kabupaten Banjarnegara dengan pemerintah pusat dilihat dari derajat desentralisasi fiskal daerah.
- b. Bagaimana pengaruh faktor-faktor internal perekonomian kabupaten Banjarnegara seperti pendapatan perkapita dan pertumbuhan sektor ekonomi dominan dalam PDRB (pertanian; industri; perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa) serta bantuan pemerintah pusat terhadap derajat kemandirian fiskal daerah.

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan penelitian ini adalah :**

- a. Menganalisis besarnya tingkat ketergantungan fiskal antara pemerintah daerah kabupaten Banjarnegara dengan pemerintah pusat dilihat dari derajat desentralisasi fiskal daerah.

- b. Menganalisis pengaruh pendapatan per kapita, pertumbuhan sektor ekonomi dominan dalam PDRB (pertanian; industri; perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa) dan bantuan pemerintah pusat terhadap derajat kemandirian fiskal daerah.

**1.3.2 Manfaat penelitian adalah :**

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah kabupaten Banjarnegara di dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan guna perumusan kebijakan baru yang bersifat administratif maupun teknis dalam rangka otonomi daerah.
- b. Diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan informasi bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS**

#### **2.1. Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1. Peranan Pemerintah**

Dalam sistim perekonomian, apakah sistem perekonomian kapitalis atau sistem perekonomian sosialis, pemerintah senantiasa mempunyai peranan yang sangat besar dan penting. Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah diklasifikasikan tiga golongan besar yaitu : (Sukanto Reksohadiprodjo, 1999 )

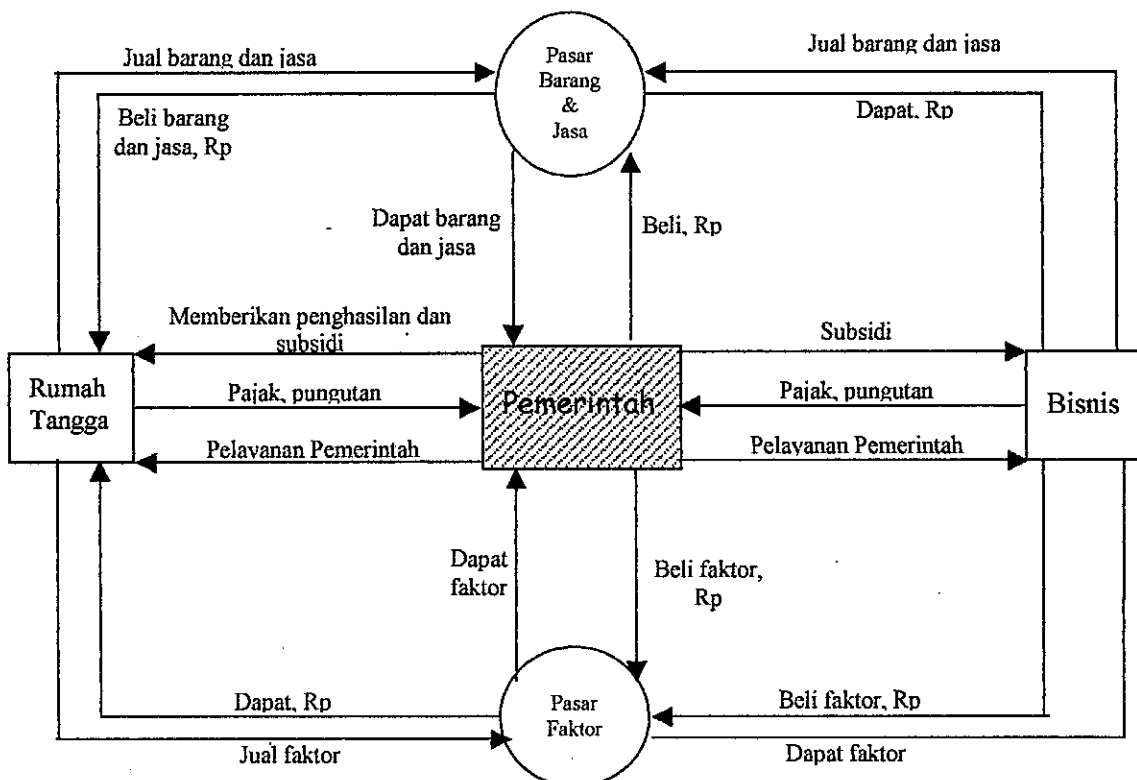
- a. Peranan Alokasi, yakni peranan pemerintah untuk mengalokasi sumber-sumber ekonomi untuk kepentingan umum dan individu, selain itu mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dapat dilaksanakan secara efisien. Masalah alokasi ini seberapa besar pemerintah harus menyediakan barang-barang publik. Berapa besar dana yang harus disediakan pemerintah untuk menyediakan jalan, jembatan, keamanan dan peradilan.
- b. Peranan Distribusi, yakni peranan pemerintah sebagai alat distribusi pendapatan atau kekayaan dengan maksud agar masyarakat sejahtera. Distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan faktor-faktor produksi, sistem warisan dan kemampuan memperoleh pendapatan. Masalah keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit dalam ilmu ekonomi dan suatu hal yang dinamis serta relatif tergantung dari persepsi masyarakat terhadap keadilan. Jadi masalah keadilan harus diserahkan kepada masyarakat

melalui Dewan Perwakilan Rakyat untuk merumuskan keadilan politik yang diinginkan. Selanjutnya pemerintah mengubah dan mengatur distribusi pendapatan melalui kebijakan fiskal dan moneter sehingga sesuai dengan distribusi pendapatan yang diinginkan oleh masyarakat.

- c. Peranan Stabilisasi, yakni peranan pemerintah sebagai alat stabilisasi perekonomian. Pemerintah menjaga, mengatur dan mengendalikan perekonomian agar tidak mengalami guncangan terutama dalam kaitan dengan kesempatan kerja dan inflasi serta deflasi.

Adapun posisi serta peranan pemerintah dalam sistem perekonomian dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Sistem Perekonomian – Unsur Pemerintah**



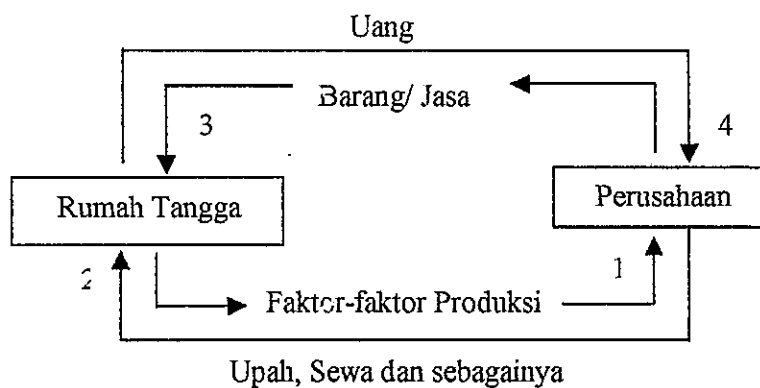
Sumber : Sukanto Reksohadiprojo, 1999

### 2.1.2. Penerimaan Pemerintah

Menurut Guritno Mangkoesobroto (1993) pada umumnya penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak misalnya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah baik pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri, penerimaan dari badan usaha milik negara, penerimaan dari lelang dan sebagainya. Penerimaan pemerintah lainnya adalah dari pajak, misalnya pajak penghasilan. Sebaliknya pungutan pemerintah karena pembayar menerima jasa tertentu dari pemerintah disebut retribusi misalnya parkir, pembayaran listrik dan sebagainya.

Dalam mengenakan pajak, pemerintah dapat mengenakan berbagai jenis pajak dan perbedaan setiap jenis pajak tersebut dapat dibedakan karena adanya perbedaan pada titik pengenaan pajak sebagaimana gambar 2.2. yang menunjukkan aliran lingkaran suatu perekonomian yang sederhana sebagai berikut :

**Gambar 2.2**  
**Arus Lingkaran Pemungutan Pajak**



Sumber : Guritno Mangkoesobroto, 1993

Dari gambar 2.2 dapat dijelaskan bahwa sektor rumah tangga menerima barang dan jasa dari sektor bisnis dan memberikan faktor-faktor produksi kepada sektor bisnis untuk digunakan dalam proses produksi. Arus uang merupakan kebalikan dari arus barang, jasa dan faktor-faktor produksi. Pemerintah dapat mengenakan pajak pada titik 1, yaitu pajak yang dikenakan pada pembelian perusahaan akan faktor-faktor produksi, misalnya pajak pertambahan nilai. Titik 2 adalah pajak yang dikenakan pada pendapatan rumah tangga (pajak penghasilan), sedangkan titik 3 adalah jenis-jenis pajak yang dikenakan pada pengeluaran rumah tangga, kemudian titik 4 adalah pajak yang dikenakan pada total penjualan perusahaan .

Penerimaan pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri sangat penting bagi keberhasilan proses pembangunan nasional, karena penerimaan pemerintah terutama dalam negeri yaitu dari minyak bumi dan gas alam, pajak dan non pajak adalah untuk menutup pengeluaran rutin pemerintah selama ini dan sisanya yang berupa tabungan pemerintah setelah ditambah dengan pinjaman luar negeri dimanfaatkan untuk mendanai pembangunan.

Adapun penerimaan dalam negeri pemerintah terdiri dari : (Sukanto Reksohadiprodjo, 1999)

- a. Penerimaan Migas
- b. Penerimaan bukan migas atau Perpajakan, terdiri atas Pajak Penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Murah (PPN & PPnBM), Bea Masuk, Cukai, Pungutan/ Pajak Ekspor,

Pajak Bumi & Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (PBB dan BPHTB) serta pajak lainnya.

c. Penerimaan bukan pajak.

Sedangkan penerimaan luar negeri pemerintah berupa :

- a. Pinjaman program yang seluruhnya merupakan pinjaman luar negeri yang segera dapat dicairkan.
- b. Pinjaman proyek yang sebagian besar berasal dari reaksi komitmen pinjaman proyek tahun-tahun sebelumnya.

### **2.1.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah dengan berpedoman pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah antara lain sebagai berikut :

- a. Dalam mengalokasikan anggaran baik rutin maupun pembangunan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip anggaran berimbang dan dinamis serta efisien dan efektif dalam meningkatkan produktifitas.
- b. Anggaran rutin diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan.

- c. Anggaran pembangunan diarahkan untuk meningkatkan sektor-sektor secara berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan skala prioritas.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Disisi lain keuangan daerah adalah sebagai alat fiskal pemerintah daerah, merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, pemeratakan hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi selain stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah makin penting, selain karena keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan, tetapi juga karena makin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah dan pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif masyarakat daerah. Selain itu peranan keuangan daerah yang makin meningkat akan mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab (Elia Radianto, 1997).

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali

sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerintah propinsi dan kabupaten/ kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. Sehubungan dengan itu maka daerah hendaknya memiliki kewenangan yang luas dan kemampuan yang optimal untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber keuangannya sendiri.

#### **2.1.4. Sistem Hubungan Keuangan Pusat – Daerah**

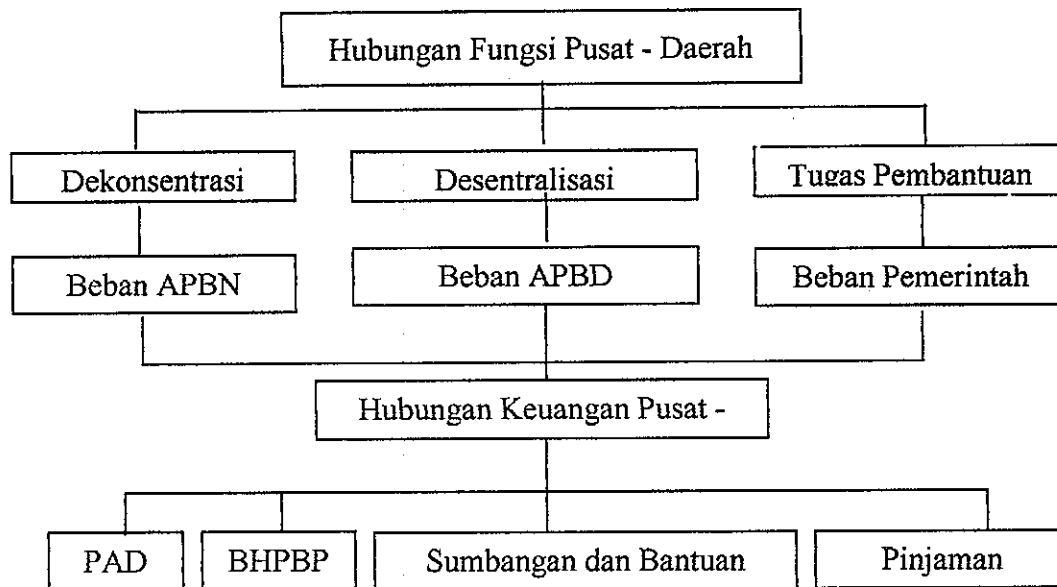
Belakangan ini ada kecenderungan yang terjadi di seluruh penjuru dunia akan tuntutan terhadap peningkatan kewenangan daerah dalam melaksanakan kebijakan ekonomi. Tuntutan ini tentu saja didukung oleh alasan bahwa permasalahan yang terjadi di daerah sedemikian kompleks dan multidimensional sehingga tidak mungkin diatasi dengan suatu terapi yang bersifat terpusat. Selain itu disadari pula bahwa *span of control* pemerintah sangat terbatas, sehingga kebijakan yang dibuat menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

Pola dasar hubungan keuangan pusat – daerah dapat dilihat di gambar 2.3. Dari diagram gambar 2.3 terlihat keterkaitan antara kewenangan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Rodinalli (Jaka Sriyana, 1999) atas sponsor bank dunia terhadap 45 negara, menunjukkan bahwa derajat desentralisasi hubungan keuangan pusat – daerah mengalami perubahan sejak tahun 1960.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah umur sebuah negara, pendapatan nasional (GNP), kebebasan media masa (informasi), tingkat industrialisasi, kepadatan penduduk, tingkat urbanisasi dan jumlah pemerintah.

daerah. Semua faktor tersebut berkorelasi positif terhadap peningkatan desentralisasi.

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Hubungan Keuangan Pusat – Daerah**



Sumber : Jaka Sriyana, 1999

Menurut K. Davey (Ibnu Syamsi, 1994) hubungan keuangan pusat dan daerah dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan :

a. Pendekatan Kapitalisasi

Berdasarkan pendekatan ini, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang keuangan adalah atas dasar *kuasi komersial*. Disini pemerintah pusat mengadakan investasi di daerah, berpatungan dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelolanya, namun keuntungan yang diperolehnya sebagian menjadi hak pusat dan sebagian menjadi hak daerah sesuai dengan besarnya modal yang ditanam dan pertimbangan manajemennya.

b. Pendekatan Sumber Pendapatan

Pendekatan ini didasarkan pada pemberian sebagian pendapatan dari sumber-sumber pendapatan oleh pusat kepada daerah. Pemberian ini dapat berupa wewenang mengelola sumber-sumber pendapatan tertentu sepenuhnya yang diserahkan kepada daerah atau wewenang untuk menikmati sebagian (persentase) dari pungutan yang dilakukan oleh daerah atas nama pusat.

c. Pendekatan Belanja

Pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan pengeluaran biaya-biaya untuk proyek atau untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah daerah. Ada beberapa persyaratan dalam pendekatan ini yaitu subsidi pemerintah pusat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan dan alokasi bantuan pada masing-masing daerah dan kebutuhan biaya-biaya pembangunan tidak boleh ada perbedaan yang mencolok dengan tahun-tahun sebelumnya.

d. Pendekatan Komprehensif

Pendekatan ini didasarkan pada pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan sendiri guna membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah dan mencoba untuk mempertemukan antara sumber-sumber pendapatan dan target belanja. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa sumber-sumber pendapatan yang boleh dikelola sepenuhnya itu merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Apabila untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah itu masih kurang (dan biasanya memang sangat kurang), maka kekurangannya itu akan disubsidi pusat.

Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah, dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Menurut Machfid Sidik (Aswarodi, 2001) perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independen di bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Hal ini berarti subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat yang selama sebagai sumber utama dalam APBD mulai kurang kontribusinya dan yang menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerah sendiri.

Sedangkan menurut Koswara (1999) ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara.

#### **2.1.5. Otonomi Daerah dan Sistem Desentralisasi**

Otonomi daerah menurut UU Nomor 22 Tahun 1999, adalah hak masyarakat daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri, serta mengembangkan potensi dan sumber daya daerah. Penyelenggaraan otonomi dimaksudkan agar dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan

prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Dengan pemberian otonomi kepada daerah, maka sistem yang dianut daerah adalah sistem desentralisasi.

Kemudian tujuan otonomi daerah menurut Smith dalam analisa CSIS yang dikemukakan oleh Syarif Hidayat (Yuliati, 2000) dibedakan dari dua sisi kepentingan yaitu kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari kepentingan pemerintah pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara bila dilihat dari sisi kepentingan pemerintah daerah ada tiga tujuan yaitu :

- a. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *political equality* artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah.
- b. Untuk menciptakan *local accountability* artinya dengan otonomi daerah akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.
- c. Untuk mewujudkan *local responsiveness* artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Selanjutnya tujuan otonomi daerah menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakasa dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan pembangunan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Nyata berarti pemberian otonomi pada daerah didasarkan pada faktor-faktor perhitungan tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan dinamis didasarkan pada kondisi dan perkembangan pembangunan. Kemudian bertanggungjawab adalah pemberian otonomi yang diupayakan untuk memperlancar pembangunan di pelosok tanah air.

Uraian diatas merupakan tujuan ideal dari otonomi daerah. Pencapaian tujuan tersebut tentunya tergantung dari kesiapan masing-masing daerah yang menyangkut ketersediaan sumber daya atau potensi daerah terutama adalah sumber daya manusia yang tentunya akan berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya pemerintahan daerah.

Sedangkan desentralisasi menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Agar daerah otonom tersebut mampu mengatur dan mengurus rumah tangga yang telah diserahkan, maka daerah harus memiliki bermacam-macam kemampuan antara lain keuangan, aparatur, ekonomi dan lain sebagainya.

Menurut Dennis Rondinelli dkk. (Didit Pontjowinoto, 1991), keberhasilan kebijakan desentralisasi pada negara sedang berkembang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, ekonomi dan budaya seperti :

- a. Sampai seberapa jauh pimpinan politik pusat dan birokrasi mendukung desentralisasi dan organisasi yang mendapat pelimpahan tanggungjawab.
- b. Sampai seberapa jauh perilaku, sikap dan budaya yang ada mendorong terciptanya desentralisasi pengambilan keputusan dan pemerintahan.
- c. Kebijakan dan program yang dirancang dengan memadai untuk mendorong desentralisasi pengambilan keputusan dan manajemen pembangunan.
- d. Sampai seberapa jauh tersedia sumber daya keuangan, manusia dan prasarana fisik yang memadai bagi organisasi yang mendapat pelimpahan tanggungjawab

Keempat faktor tersebut memiliki derajat kepentingan yang sama dan dalam banyak hal sangat relevan dalam kebijakan desentralisasi di Indonesia.

Atas desakan yang cukup kuat dari masyarakat dan semakin beratnya beban pusat untuk mengatasi sendiri tantangan pembangunan yang semakin kompleks, timbul kesadaran baru bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus lebih demokratis, mendorong partisipasi, kemajuan dan kemandirian daerah. Secara konseptual hal itu tercermin dari kemauan pusat untuk menempatkan daerah kabupaten dan kota dengan kewenangan yang luas (Turtiantoro, 2000).

#### **2.1.6. Desentralisasi Fiskal Daerah.**

Desentralisasi fiskal daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran apa yang disebut Derajat Desentralisasi Fiskal dengan berbagai proxy sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Rouhaty Nur Hikmah (Sukanto Reksohadiprodjo, 1999) sebagai berikut :

- (1) 
$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (= PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (=TPD)}} \times 100 \%$$
- (2) 
$$\frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk Daerah (=BHPBP)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (=TPD)}} \times 100 \%$$
- (3) 
$$\frac{\text{Sumbangan Daerah (=SB)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (=TPD)}} \times 100 \%$$

Dimana :  $TPD = PAD + BHPBP + SB$ , kalau hasilnya tinggi, derajat desentralisasinya besar (mandiri).

Berdasarkan pada kriteria yang dibuat oleh Badan Litbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991), maka kriteria derajat desentralisasi fiskal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) 0,00 % s/d 10 % : sangat kurang
- 2) 10,1 % s/d 20 % : kurang
- 3) 20,1 % s/d 30 % : cukup
- 4) 30,1 % s/d 40 % : baik
- 5) 40,1 % s/d 50 % : sangat baik
- 6) > 50 % : memuaskan

### **2.1.7. Kemandirian Fiskal Daerah (Otonomi Fiskal Daerah)**

Kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Menurut Mardiasmo (1999) disebutkan bahwa manfaat adanya kemandirian fiskal adalah :

- a. Mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya serta potensi yang tersedia di daerah.
- b. Memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang memiliki informasi lebih lengkap.

Sedangkan Kenneth Davey (Elia Radianto, 1997) mengemukakan bahwa hubungan antara ketergantungan daerah atas dana pusat dengan keleluasaan daerah akan pengeluaran-pengeluarannya adalah tidak langsung. Utamanya bagi otonomi daerah adalah mempunyai sumber pendapatan yang elastis, tidak tergantung pada asal dana tersebut dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana bagi kepentingan masyarakat daerah di dalam batas-batas yang ditentukan perundang-undangan. Alokasi dana dari pemerintah pusat yang disertai kontrol yang ketat dalam penggunaannya tidak akan mendorong daerah dalam menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah yang ada, tetapi justru dapat mematikan inisiatif daerah yang bersangkutan. Selain itu akan membuat daerah menjadi makin tergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat.

Dari hal tersebut diatas kemandirian fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi dan lain-lain. Karena itu otonomi daerah dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal

yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya (Elia Radianto, 1997).

Kemudian untuk mengukur seberapa besar tingkat kemandirian fiskal suatu daerah digunakan ukuran Derajat Kemandirian Fiskal Daerah/ Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DKFD/ DOFD) yaitu rasio antara PAD dengan total penerimaan APBD pada tahun yang sama, tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat (Elia Radianto, 1977).

#### **2.1.8. Transfer Pemerintah Pusat.**

Alokasi dari anggaran pemerintah pusat sering diungkapkan sebagai transfer pemerintah memiliki peranan yang besar bagi kebanyakan tatanan pemerintahan daerah. Adapun alokasi oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengandung tujuan berbeda-beda yang mempengaruhi bentuk dan lingkupannya, (Kenneth Davey, 1983, terjemahan Amanullah, dkk., 1988) yaitu :

- a. Pembelanjaan, seluruhnya atau sebagian, biaya pelayanan atau program-program pembangunan yang kepentingannya bersifat nasional yaitu yang dipandang sejalan dengan keinginan, kebijaksanaan dan sasaran pada tingkat nasional.
- b. Mendorong upaya oleh pemerintahan regional untuk program-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijaksanaan nasional.
- c. Merangsang pertumbuhan ekonomi regional, baik untuk membantu pertumbuhan maupun untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah.

- d. Mengendalikan pengeluaran regional untuk memastikan penyesuaian terhadap standar dan kebijaksanaan nasional.
- e. Memantapkan standar pelayanan atau pembangunan yang adil atau lebih adil.
- f. Mengembangkan wilayah-wilayah yang kapasitas fiskalnya rendah, suatu potensi yang relatif rendah untuk meningkatkan penerimaan langsung mereka.
- g. Membantu wilayah-wilayah untuk mengatasi keadaan darurat.

Disisi lain Boadway & Wildasin (Elia Radianto, 1997) menyebutkan bahwa bantuan (grant) dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah merupakan fakta didalam pemerintahan dengan sistem multi tingkat. Pemberian bantuan mempunyai beberapa tujuan antara lain mengatasi masalah *eksternalitas* atau *spillover* antar daerah, mengatasi perbedaan dalam kemampuan menarik pajak atau ketidakseimbangan fiskal, mencapai redistribusi pendapatan yang lebih merata antar daerah dan mengatasi inefisiensi sebagai akibat mobilitas tenaga kerja antar daerah.

Di Indonesia transfer dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah tingkat II terdiri dari subsidi daerah otonom (SDO) dan bantuan pembangunan di berbagai sektor (Didit Pontjowinoto, 1991). Subsidi daerah otonom umumnya diarahkan pada kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana serta diarahkan untuk membiayai sebagian besar belanja pegawai dan non pegawai. Sedangkan bantuan pembangunan lebih diarahkan pada pembangunan prasarana baru.

SDO belanja pegawai dibayarkan atas daftar pegawai negeri yang disahkan dengan persetujuan pusat. Sedang SDO belanja non pegawai terdiri dari belanja yang diarahkan dan belanja yang ditetapkan. Belanja non pegawai yang

ditetapkan terdiri dari dua kategori yaitu subsidi/ bantuan dan ganjaran, seperti subsidi/ bantuan untuk pengembangan obyek pariwisata, biaya operasional rumah sakit umum daerah dan ganjaran untuk biaya operasional berbagai aparat daerah.

Bantuan pembangunan daerah lebih dikenal dengan istilah bantuan inpres, terdiri dari bantuan umum berupa bantuan pembangunan propinsi, kabupaten/ kota dan desa. Bantuan khusus berupa bantuan pembangunan jalan, jembatan, sarana kesehatan serta penghijauan/ reboisasi.

Kemudian menurut UU Nomor 25 Tahun 1999 istilah sumbangan dan bantuan berubah menjadi dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Alokasi DAU menurut UU Nomor 25 Tahun 1999 dimaksudkan sebagai dana perimbangan untuk mengurangi kesenjangan horisontal. Jadi kekurangan dana yang dialami pemerintah daerah yang miskin sumberdaya alam akan ditutup dengan DAU tersebut. Dalam penentuan DAU tersebut variabel-variabel yang menjadi ukuran adalah meliputi indeks harga, jumlah penduduk suatu daerah, luas wilayah, jumlah penduduk miskin, indikator geografis, PDRB dan faktor penyesuai agar kemungkinan terjadinya penurunan jumlah dana perimbangan terhindarkan (FX. Sugiyanto, 2000).

Sementara itu Devas dkk. (Elia Radianto, 1997).mengemukakan bahwa bantuan pembangunan dalam bentuk bantuan umum, pemerintah daerah berwenang menentukan untuk apa bantuan tersebut digunakan, asal saja dipergunakan untuk sektor-sektor yang tepat sesuai dengan program yang telah disetujui sebelumnya dan asal saja metode padat karya diterapkan dalam mendirikan bangunan. Sedangkan bantuan yang bersifat khusus, pemerintah pusat

menetapkan prioritas dan pembagian dana, sementara pemerintah daerah berwenang dalam hal penentuan lokasi proyek dan cara melaksanakannya

Sejalan dengan upaya memperkuat otonomi daerah atau peningkatan PAD, maka bantuan dari pemerintah pusat (grant) sesungguhnya merupakan suatu instrumen yang diharapkan dapat memacu/ mendorong peningkatan PAD tersebut dan bukan sebaliknya. Menurut Nujaman Arsyad (Elia Radianto, 1997) dikatakan bahwa hakekat bantuan/ subsidi adalah untuk memperkuat tingkat otonomi suatu daerah. Karena itu daerah perlu memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana-dana bantuan yang ada sehingga mempunyai dampak positif terhadap peningkatan PAD.

#### **2.1.9. Pembangunan Ekonomi Daerah**

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi/ pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Lincolin Arsyad, 1999).

Disisi lain menurut Todaro (2000) disebutkan bahwa pembangunan bukan hanya berarti penekanan pada akselerasi dan peningkatan dalam pertumbuhan GNP per kapita sebagai indeks dari pembangunan. Akan tetapi pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang meliputi pula reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran

pembangunan yaitu masyarakat adil dan makmur, perlu diusahakan adanya keserasian dan keselarasan dalam pemakaian sumber daya alam, sumber daya manusia serta permodalan dan teknologi dalam pelaksanaan proses pembangunan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang bersangkutan.

#### **2.1.10. Pertumbuhan Ekonomi**

Di dalam analisa makro ekonomi pertumbuhan ekonomi mempunyai dua segi pengertian yang berbeda. Di satu pihak istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan bahwa sesuatu perekonomian telah mengalami perkembangan ekonomi dan mencapai taraf kemakmuran yang lebih tinggi. Di lain segi istilah tersebut bertujuan untuk menggambarkan tentang masalah ekonomi yang dihadapi dalam jangka panjang.

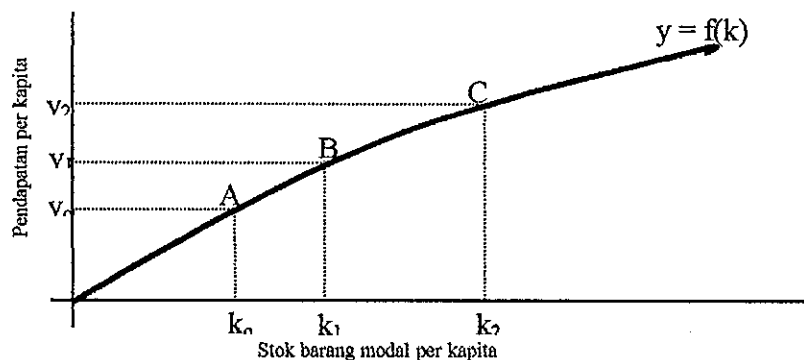
Masalah pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang dihadapi sesuatu negara dapat dibedakan kepada tiga aspek : (Sadono Sukirno 1999)

- a. Aspek pertama dari masalah pertumbuhan itu bersumber dari perbedaan diantara tingkat pertumbuhan potensial yang dapat dicapai dan tingkat pertumbuhan yang sebenarnya tercapai. Dari satu tahun ketahun lainnya sumber-sumber daya dalam suatu negara akan mengalami pertambahan. Pertambahan ini dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yaitu tingkat produksi nasional yang dihasilkan bertambah besar. Investasi dimasa kini akan menambah barang-barang modal di masa depan dan hal ini akan menambah potensi negara untuk menghasilkan barang dan jasa.

- b. Aspek kedua mengenai masalah pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan potensi pertumbuhan itu sendiri. Ada kalanya pertambahan potensial dari kemampuan menghasilkan pendapatan nasional adalah tidak mencukupi untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi.
- c. Aspek ketiga dari masalah pertumbuhan ekonomi adalah mengenai keteguhan pertumbuhan ekonomi yang berlaku dari satu tahun ketahun lainnya. Pertumbuhan ekonomi tidaklah berkembang secara linier, ada kalanya perekonomian berkembang dengan pesat, ada kalanya pergerakannya lambat dan kadang-kadang berlaku kemunduran yakni kegiatannya lebih rendah dari masa sebelumnya.

Lebih jelasnya pertumbuhan ekonomi diperlihatkan pada gambar 2.4 sebagai berikut :

**Gambar 2.4**  
**Akumulasi Modal dan Pertumbuhan Ekonomi**



Sumber : Sadono Sukimo, 1999.

Dalam gambar 2.4 sumbu tegak menggambarkan tingkat pendapatan per kapita dan sumbu datar menggambarkan nilai stok modal per kapita. Kemudian Kurva  $y = f(k)$  menggambarkan ciri hubungan diantara tingkat pertumbuhan

ekonomi (yang dinyatakan sebagai tingkat pendapatan per kapita) dengan tingkat stok modal yang tersedia. Selain itu kurva tersebut menggambarkan bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan nilai stok modal per kapita.

Semakin besar nilai nilai stok modal per kapita, semakin tinggi pendapatan per kapita atau tingkat pertumbuhan ekonomi. Titik A menunjukkan apabila stok modal per kapita adalah  $k_0$ , tingkat pendapatan per kapita adalah  $y_0$  dan apabila stok modal per kapita meningkat menjadi  $k_1$  maka pendapatan per kapita akan meningkat menjadi  $y_1$ . Gambaran ini berarti bahwa semakin tinggi stok barang modal dalam suatu negara, semakin tinggi pula tingkat pertumbuhannya.

Jadi pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sadono Sukirno, 1994). Apabila kemakmuran masyarakat meningkat, maka akan membawa dampak salah satunya pada permintaan akan barang modal yang juga meningkat. Sebaliknya dari pihak produsen juga akan meningkatkan stok barang modalnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan permintaan akan barang modal yang meningkat implikasinya berakibat pada pendapatan daerah juga meningkat.

#### **2.1.11. Pendapatan per Kapita**

Salah satu komponen dari pendapatan nasional yang selalu dilakukan penghitungannya adalah pendapatan per kapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu waktu tertentu (Sadono Sukirno, 1999). Nilainya diperoleh dari membagi nilai pendapatan nasional bruto atau pendapatan

domestik bruto pada suatu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut.

Dengan demikian pendapatan per kapita dapat dihitung dengan menggunakan salah satu persamaan sebagai berikut : (Sadono Sukirno,1999).

$$\text{a. Per Kapita PNB} = \frac{\text{Pendapatan Nasional Bruto}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

$$\text{b. Per Kapita PDB} = \frac{\text{Pendapatan Domestik Bruto}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Dalam menghitung pendapatan per kapita ada dua macam penghitungan dapat dilakukan yaitu berdasarkan harga yang berlaku dan harga konstan. Data pendapatan per kapita menurut harga berlaku penting untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan rata-rata dari penduduk negara itu membeli barang-barang. Sedang data pendapatan per kapita menurut harga konstan perlu dihitung untuk menunjukkan perkembangan tingkat kemakmuran disuatu negara . Suatu masyarakat dipandang mengalami pertambahan dalam kemakmuran masyarakatnya apabila pendapatan per kapita menurut harga konstan atau pendapatan per kapita riil terus menerus bertambah.

#### **2.1.12. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berbicara mengenai sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan, menurut ketentuan pasal 79 UU Nomor 22 Tahun 1999 junto pasal 3 UU Nomor 25 tahun 1999, menyatakan bahwa sumber pendapatan/ penerimaan daerah terdiri :

##### **1). Pendapatan Asli Daerah:**

###### **a). Hasil pajak daerah**

- b). Hasil retribusi daerah
  - c). Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah.
  - d). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 2). Dana Perimbangan
  - 3). Pinjaman Daerah.
  - 4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD ada hal-hal yang perlu diketahui : (Thamrin Simanjuntak, 2001)

- 1). Kondisi awal suatu daerah
  - a). Besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan.
  - b). Kemampuan masyarakat untuk membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- 2). Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD.  
Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan PAD.
- 3). Perkembangan PDRB per kapita riil.  
Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (ability to pay) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 4). Pertumbuhan Penduduk.  
Besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik akan meningkat.
- 5). Tingkat Inflasi.  
Inflasi akan meningkatkan penerimaan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel.

6). Penyesuaian Tarif.

Peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif. Untuk pajak atau retribusi yang tarifnya ditentukan secara tetap, maka dalam penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan laju inflasi.

7). Pembangunan Baru.

Penambahan PAD juga dapat diperoleh bila pembangunan-pembangunan baru ada, seperti pembangunan pasar, pembangunan terminal, pembangunan jasa pengumpulan sampah dan lain-lain.

8). Sumber Pendapatan Baru.

Adanya kegiatan usaha baru dapat mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada. Misalnya usaha persewaan laser disc, usaha persewaan komputer/ internet dan lain-lain.

9). Perubahan Peraturan.

Adanya perubahan peraturan baru, khususnya yang berhubungan dengan pajak dan atau retribusi jelas akan meningkatkan PAD.

Selanjutnya untuk menuju sistem perpajakan yang baik, ada dua pendekatan yang perlu dilakukan yaitu : (Yuswar dan Mulyadi, 2003)

- 1) "Ability to pay approach", pendekatan ini sering disebut dengan prinsip kemampuan membayar atau berdasarkan atas daya pikul seseorang wajib pajak. Artinya seorang wajib pajak akan dikenai beban sesuai dengan kemampuannya untuk membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar yang sama dikenai pajak yang sama bebannya

(horizontal equity) dan wajib pajak yang kemampuannya berbeda dikenai pajak yang berbeda pula (vertical equity).

- 2) "Benefit Approach", disini mengandung arti bahwa prinsip pengenaan pajak didasarkan atas manfaat yang diterima oleh seorang wajib pajak dalam pembayaran pajak itu kepada pemerintah.

Kedua pendekatan tersebut adalah berdasarkan atas prinsip kesamaan (equity), dimana prinsip kemanfaatan (benefit principle) berdasar atas kesamaan manfaat yang diterima oleh wajib pajak sesuai dengan pajak yang dibayarnya. Sedang prinsip kemampuan membayar (ability to pay) berdasarkan atas kesamaan pengorbanan yang sesuai dengan kemampuan seseorang wajib pajak untuk membayar pajak.

#### **2.1.13. Penelitian Terdahulu**

Penelusuran penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian kemandirian fiskal daerah yang sudah dan atau belum diteliti oleh peneliti lain. Dengan penelusuran penelitian terdahulu ini akan dapat dipastikan sisi ruangan yang dapat diteliti oleh penelitian ini, dengan harapan penelitian ini tidak tumpang tindih dan tidak melakukan penelitian ulangan dengan penelitian terdahulu.

Penelitian terdahulu yang dipilih untuk dikedepankan disini adalah :

- a. Elia Radianto (1997).

"Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II Maluku" adalah judul penelitian yang dilakukan oleh Elia Radianto. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah :

- a.1. Semakin tinggi perkembangan ekonomi daerah, semakin tinggi derajat otonomi fiskal.
- a.2. Semakin besar bantuan pemerintah pusat dalam bentuk block grant, semakin meningkatkan deajat otonomi fiskal daerah tingkat II Maluku.
- a.3. Peranan PAD di daerah tingkat II Maluku yang masih sangat rendah dalam keuangan daerah.

b. Jaka Sriyana (1999).

Peneliti diatas mengetengahkan judul “Hubungan Keuangan Pusat – Daerah, Reformasi Perpajakan dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah”. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan PAD (pajak dan retribusi daerah), Menganalisa dampak reformasi perpajakan terhadap penerimaan daerah dan pembangunan daerah serta menganalisa strategi/ kebijakan alternatif dalam upaya meningkatkan PAD.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa :

- b.1. Terdapat pengaruh yang nyata dan signifikan dari variabel independent (pendapatan per kapita dan jumlah penduduk) terhadap perubahan PAD baik untuk daerah tingkat I maupun tingkat II.
- b.2. Peningkatan pajak dan PAD masing-masing daerah di Indonesia juga dipengaruhi adanya kebijakan reformasi perpajakan.
- b.3. Sistem hubungan keuangan pusat-daerah di Indonesia menunjukkan adanya sentralisasi yang cukup besar pada pemerintah pusat.

c. Soedjono (2000).

Penelitian yang berjudul “Strategi Sumber Daya Manusia Untuk Pengendalian Jumlah Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Rutin Dalam Rangka Otonomi Daerah” ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi strategi kemandirian kelancaran operasional bidang pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di kota Surabaya.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah secara bersama-sama strategi kebutuhan sumber dana PAD ( $X_1$ ) dan strategi kebutuhan sumber dana dari porsi pembagian bagi hasil pajak dan bukan pajak ( $X_2$ ) berpengaruh secara nyata dan signifikan dari variabel independent yakni terhadap variabel dependent yakni strategi kelancaran operasional kemandirian daerah (Y).

d. FX. Sugiyanto (2000).

Judul yang diketengahkan adalah “Kemadirian dan Otonomi Daerah”.

Ada beberapa pokok pikiran dari makalah tersebut sebagai berikut :

- d.1. Intensifikasi sumber-sumber PAD yang telah ada serta ekstensifikasi dengan penciptaan pajak baru seperti pajak kekayaan, pajak warisan, pajak pendapatan sewa atau pajak atas jasa sewa rumah maupun pajak konsumsi dapat dilakukan.
- d.2. Perlu dilakukan revisi atas UU Nomor 18 tahun 1997 agar optimalisasi penarikan pajak dan retribusi dapat dilaksanakan.
- d.3. Diperlukan kesanggupan pemerintah pusat untuk melepaskan pajak-pajak tertentu untuk diberikan kewenangan pengenaannya kepada daerah.

d.4. Dengan pertimbangan efisiensi seharusnya titik berat otonomi ada di tingkat propinsi atau dirumuskan hubungan kewenangan kabupaten dan propinsi.

e. Turtiantoro (2000).

Peneliti ini menyetengahkan judul "Otonomi Daerah Dalam Prespektif Administrasi Pembangunan". Adapun beberapa pokok pikiran dari makalahnya adalah bahwa kedepan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah semakin rumit. Eksistensi daerah tidak ditentukan oleh kebijakan yang protektif dan restriktif, namun kebijakan yang mendorong kualitas pelayanan dan kemampuan berkompetisi secara sehat dan produktif. Dengan kata lain bila pembangunan daerah yang dilaksanakan tidak juga mampu menopang eksistensi daerah, maka wajar bila harus menerima kenyataan daerah yang bersangkutan terkena likuidasi dan harus bergabung dengan daerah lain.

f. M. Irsad dan Sri Sudarsi (2001)

"Otonomi Daerah : Beberapa Masalah Dalam Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah" adalah judul yang dibuat oleh dua peneliti diatas. Adapun pokok-pokok pikiran yang dapat disajikan adalah bahwa :

f.1. Keberhasilan pembangunan di daerah sekarang ini sangat tergantung kepada pemerintah daerah dan masyarakat di daerah tersebut dalam mengoptimalkan potensi daerah yang tersedia.

- f.2. Pemerintah daerah harus mampu menjalin hubungan yang harmonis kepada setiap komunitas yang ada di daerahnya, sehingga dukungan dan partisipasi segenap lapisan masyarakat akan dapat dijadikan modal dasar dalam pembangunan daerah.
- f.3. Dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat selayaknya ditempatkan sebagai stimulus, sehingga akan mampu menarik sumber dana lebih besar lagi yang berasal dari potensi ekonomi daerah yang dimiliki dan laju pertumbuhan ekonomi daerah dapat tetap melaju.
- f.4. Untuk menghindari ketidakadilan antar daerah, pemerintah daerah jangan mengandalkan lobi terhadap pemerintah pusat untuk memperbesar baik dana DAU maupun DAK yang harus dibagikan keseluruh daerah kabupaten/ kota.

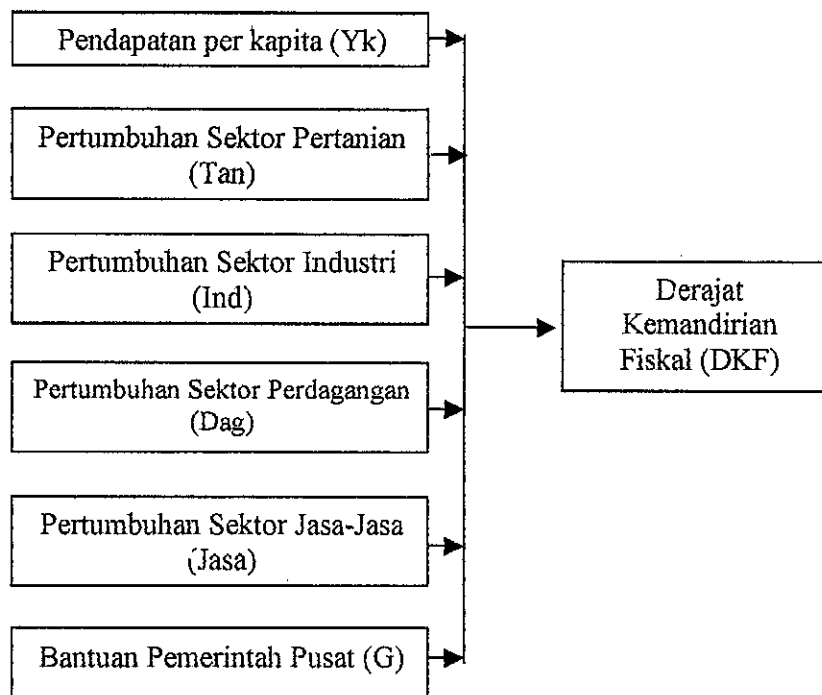
## **2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis**

Salah satu azas pembangunan daerah adalah adanya desentralisasi, hal ini berarti bahwa daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan pembangunan. Adapun wujud dari kewenangan itu adalah diberikannya otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan program-program regional, sehingga seluruh pertanggungjawaban pengelolaan pembiayaannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Esensi dari kebijakan otonomi daerah menuntut bagaimana keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan maupun menjawab persoalan-persoalan tersebut. Indikator yang dapat menunjukkan kemampuan daerah dalam pembiayaan pembangunan adalah antara lain berapa besar derajat desentralisasi

fiskal dan yang lebih penting bagaimana pengaruh dari variabel-variabel pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi daerah serta bantuan pemerintah pusat terhadap derajat kemandirian fiskal daerah atau derajat otonomi fiskal daerah.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mengacu dari hasil penelitian Elia Radianto (1997) serta penelitian Anwar Shah (Jaka Sriyana, 1999), yang secara ringkas dapat diimplementasikan sebagai berikut :



### 2.3. Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji adalah :

- a. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat kabupaten Banjarnegara diduga berpengaruh dan berhubungan positif terhadap derajat kemandirian fiskal daerah

- c. Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan dalam PDRB kabupaten Banjarnegara seperti sektor pertanian; sektor industri; sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa diduga berpengaruh dan berhubungan positif terhadap derajat kemandirian fiskal daerah.
- d. Bantuan pemerintah pusat diduga berpengaruh dan berhubungan negatif terhadap derajat kemandirian fiskal daerah atau tidak mampu memandirikan keuangan daerah kabupaten Banjarnegara.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Sumber Data.**

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder (time series) selama kurun waktu tahun 1977 s/d 2000 yang berupa :

- a. Data realisasi penerimaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) atau total penerimaan daerah (TPD) kabupaten Banjarnegara, dimana didalamnya terdapat data :
  - a.1. Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu.
  - a.2. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan penerimaan lain-lain.
  - a.3. Bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan dan penerimaan lainnya.
  - a.4. Pinjaman pemerintah daerah.
- b. Data produk domestik regional bruto (PDRB) kabupaten Banjarnegara, dimana di dalamnya terdapat data pendapatan per kapita dan besaran/ nilai beberapa sektor yang mana dalam penelitian ini hanya difokuskan pada sektor pertanian; sektor industri; sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa jasa.

Adapun sumber data berupa buku-buku laporan tahunan beberapa terbitan seperti Statistik keuangan pemerintah daerah tingkat II, Banjarnegara dalam angka, Pendapatan regional kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dalam angka, Statistik keuangan pemerintah daerah Jawa Tengah, Pendapatan regional propinsi Jawa Tengah dan Jurnal-jurnal beberapa terbitan yang dapat diperoleh diberbagai instansi yaitu :

- a. Kantor Bupati Kabupaten Banjarnegara (Bagian Keuangan)
- b. Bappeda Kabupaten Banjarnegara
- c. BPS Propinsi Jawa Tengah dan BPS Kabupaten Banjarnegara
- d. Universitas/ Perguruan Tinggi.

### **3.2. Metode Pengumpulan Data.**

Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran dan pencatatan atau sensus pada beberapa dokumentasi data yang terkait dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan menyangkut keseluruhan komponen data yang dibatasi dalam jangka waktu selama 24 tahun pengamatan yakni tahun 1977 s/d 2000.

### **3.3 Teknik Analisis.**

Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif, sedang untuk menjawab tujuan kedua digunakan analisis regresi linier berganda.

#### **3.3.1. Analisis Diskriptif.**

Data-data yang diperlukan dalam analisis ini berupa :

- 1) Pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diterima pemerintah kabupaten Banjarnegara berupa pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah dan penerimaan lain-lain, dalam rupiah.
- 2) Bagian bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) yaitu penerimaan pemerintah kabupaten Banjarnegara yang diperoleh dari prosentase bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor (PKB) dan iuran hasil hutan (IHH), dalam rupiah.
- 3) Sumbangan dan bantuan (S/B) yaitu penerimaan pemerintah kabupaten Banjarnegara yang berasal dari pemerintah pusat meliputi subsidi daerah otonom, bantuan pembangunan melalui berbagai dana inpres, dalam rupiah.
- 4) Total penerimaan daerah (TPD) yaitu totalitas yang diterima pemerintah kabupaten Banjarnegara meliputi bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak/ bukan pajak (BHPBP), sumbangan dan bantuan dan penerimaan lainnya serta pinjaman pemerintah daerah, dalam rupiah.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, yang dilakukan dengan menggunakan ukuran apa yang disebut Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (Sukanto Reksomadiprodjo, 1999). Perhitungannya menggunakan rasio PAD terhadap TPD, rasio BHPBP terhadap TPD serta rasio Sumbangan dan Bantuan (S/B) terhadap TPD yang nantinya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik.

Hal ini bermanfaat untuk menggambarkan seberapa besar tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah kabupaten Banjarnegara terhadap pemerintah pusat selama kurun waktu penelitian.

Adapun untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan fiskal digunakan kriteria derajat desentralisasi fiskal daerah yang dibuat oleh Badan Litbang Depdagri dan Fispol UGM (1991) sebagai berikut :

- 1) 0,00 % s/d 10 % : sangat kurang
- 2) 10,1 % s/d 20 % : kurang
- 3) 20,1 % s/d 30 % : cukup
- 4) 30,1 % s/d 40 % : baik
- 5) 40,1 % s/d 50 % : sangat baik
- 6) > 50 % : memuaskan

### **3.3.2. Analisis Regresi Linier Berganda.**

Analisis ini untuk menjawab tujuan kedua yaitu menganalisis pengaruh pendapatan per kapita, pertumbuhan sektor ekonomi dominan dalam PDRB (pertanian; industri; perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa) dan bantuan pemerintah pusat terhadap derajat kemandirian fiskal daerah.

Variabel-variabel yang digunakan dalam analisis ini mengacu dari hasil penelitian Elia Radianto (1997) serta penelitian Anwar Shah (Jaka Sriyana, 1999). Analisis model penelitian ini menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) dengan Model Penyesuaian Parsial (PAM = *Partial Adjustment Model*). Adapun model PAM yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$DKF_t = f [ \text{Pendapatan per kapita } (Yk_t), \text{ Pertumbuhan sektor pertanian } (Tan_t); \text{ Pertumbuhan sektor industri } (Ind_t); \text{ Pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran } (Dag_t); \text{ Pertumbuhan sektor jasa-jasa } (Jasa_t), \text{ Bantuan pemerintah pusat } (G_t) ]$ .

Dimana :

$DKF_t$  : Derajat Kemandirian Fiskal yaitu rasio PAD terhadap total penerimaan APBD (tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat), dalam periode tahun tertentu, dalam persen.

Pendapatan per kapita ( $Yk_t$ ) : Pendapatan rata-rata penduduk pada suatu wilayah/ daerah dalam periode waktu tertentu (Sadono Sukirno, 1999), dalam rupiah.

Pertumbuhan sektor pertanian ( $Tan_t$ ) : Pertumbuhan per tahun sektor pertanian dalam PDRB, dalam rupiah.

Pertumbuhan sektor industri ( $Ind_t$ ) : Pertumbuhan per tahun sektor industri dalam PDRB, dalam rupiah.

Pertumbuhan sektor per-dagangan, hotel dan restoran ( $Dag_t$ ) : Pertumbuhan per tahun sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam PDRB, dalam rupiah.

Pertumbuhan sektor jasa-jasa ( $Jasa_t$ ) : Pertumbuhan per tahun sektor jasa-jasa dalam PDRB, dalam rupiah.

Bantuan pemerintah pusat ( $G_t$ ) : Bantuan dari pemerintah pusat dalam periode tahun anggaran tertentu, diukur dengan menggunakan rasio nilai bantuan terhadap total transfer, dalam persen.

Selanjutnya bentuk model regresi yang diteliti menjadi sebagai berikut :

Model Regresi Linier Berganda Biasa.

$$DKF_t = \alpha_0 + \alpha_1 Yk_t + \alpha_2 Tan_t + \alpha_3 Ind_t + \alpha_4 Dag_t + \alpha_5 Jasa_t + \alpha_6 G_t + \mu_t \dots (2.1)$$

Untuk menurunkan dari model biasa ke model dinamis dapat dijelaskan sebagai berikut : (Gujarati, 1999, terjemahan Sumarno Zain)

Misalkan  $DKF_t^*$  adalah derajat kemandirian fiskal jangka panjang sebenarnya yang diminta, sehingga model regresi dapat ditulis :

$$DKF_t^* = \alpha_0 + \alpha_1 Yk_t + \alpha_2 Tan_t + \alpha_3 Ind_t + \alpha_4 Dag_t + \alpha_5 Jasa_t + \alpha_6 G_t + \mu_t \dots \dots \dots (2.2)$$

Karena variabel derajat kemandirian fiskal (DKF) jangka panjang sebenarnya yang diminta tidak bisa diamati secara langsung. Dalam hal ini Nerlove mempostulatkan hipotesis yang dikenal sebagai penyesuaian parsial, dengan persamaan penyesuaian sebagai berikut :

$$DKF_t - DKF_{t-1} = \delta (DKF_t^* - DKF_{t-1}) + \mu_t \dots \dots \dots (2.3)$$

Dimana :

$\delta$  (baca : delta) merupakan koefisien penyesuaian yang besarnya  $0 < \delta < 1$ .

$DKF_t - DKF_{t-1}$  = perubahan derajat kemandirian fiskal aktual,

$DKF_t^* - DKF_{t-1}$  = perubahan derajat kemandirian fiskal yang diminta.

$\mu_t$  merupakan bentuk gangguan yang diharapkan mempunyai nilai rata-rata nol.

Dengan mensubstitusikan  $DKF_t^*$  dari persamaan (2.2) kedalam persamaan (2.3) dan menyusun kembali, maka dapat diperoleh penurunan model regresi linier biasa ke Model Regresi Linier Berganda Dinamis. sebagai berikut :

$$DKF_t = \alpha_0 \delta + \alpha_1 \delta Yk_t + \alpha_2 \delta Tan_t + \alpha_3 \delta Ind_t + \alpha_4 \delta Dag_t + \alpha_5 \delta Jasa_t + \alpha_6 \delta G_t + (1-\delta) DKF_{t-1} + \delta \mu_t \dots \dots \dots (2.4)$$

Atau dapat ditulis

$$DKF_t = \beta_0 + \beta_1 Yk_t + \beta_2 Tan_t + \beta_3 Ind_t + \beta_4 Dag_t + \beta_5 Jasa_t + \beta_6 G_t + \beta_7 DKF_{t-1} + v_t \dots \dots \dots (2.5)$$

Dimana :

$$\beta_0 = \alpha_0 \delta; \quad \beta_1 = \alpha_1 \delta; \quad \beta_2 = \alpha_2 \delta; \quad \beta_3 = \alpha_3 \delta; \quad \beta_4 = \alpha_4 \delta; \quad \beta_5 = \alpha_5 \delta; \quad \beta_6 = \alpha_6 \delta;$$

$$\beta_7 = (1-\delta); \quad v_t = \delta \mu_t$$

Sebelum dilakukan analisis regresi, terhadap data-data yang ada perlu dilakukan penyesuaian terlebih dahulu. Adapun data-data yang disesuaikan yakni data APBD perlu dilakukan interpolasi, hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan tahun pelaksanaan APBD dalam periode penelitian yakni dari tahun fiskal menjadi tahun kalender sehingga sama dengan tahun penghitungan PDRB, dengan rumus sebagai berikut :

$$Q_{1t} = \frac{1}{4} (Y_t - 4,5/12 (Y_t - Y_{t-1})).$$

$$Q_{2t} = \frac{1}{4} (Y_t - 1,5/12 (Y_t - Y_{t-1})).$$

$$Q_{3t} = \frac{1}{4} (Y_t + 1,5/12 (Y_t - Y_{t-1})).$$

$$Q_{4t} = \frac{1}{4} (Y_t + 4,5/12 (Y_t - Y_{t-1})).$$

$Y_t$  = Data yang diinterpolasi pada tahun t

$Y_{t-1}$  = Data kelambanan

$Q_{kt}$  = Data kuartalan ke k tahun t

Untuk mendapatkan hasil APBD tahun kalender tahun ke t, dengan cara menjumlahkan hasil dari interpolasi tersebut yaitu  $Q_{4t-1} + Q_{1t} + Q_{2t} + Q_{3t}$ . Dengan cara yang sama seperti APBD tersebut diatas, dilakukan juga interpolasi data terhadap besaran nilai dari pos PAD, pos bantuan pemerintah pusat serta total transfer (sumbangan dan bantuan).

Hasil interpolasi data-data tersebut diatas selanjutnya digunakan untuk menghitung nilai dari pada variabel tidak bebas yakni derajat kemandirian fiskal

(DKF) yang merupakan rasio PAD terhadap total penerimaan APBD (tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat). Begitu pula terhadap variabel bebas yakni bantuan pemerintah pusat yang merupakan rasio nilai bantuan terhadap total transfer (sumbangan dan bantuan), perhitungannya dicari dengan memasukkan nilai bantuan dan nilai total transfer hasil dari interpolasi data.

Kemudian terhadap variabel bebas yakni sektor dominan dalam PDRB (pertanian; industri; perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa) yang data mentahnya terdiri atas harga konstan tahun dasar 1975 (1977 s/d 1982), tahun dasar 1983 (1983 s/d 1992) dan tahun dasar 1993 (1993 s/d 2000) harus disamakan terlebih dahulu ke tahun dasar 1993. Dengan demikian yang perlu dilakukan persamaan ke tahun dasar 1993 adalah mulai tahun 1977 s/d 1992.

Adapun langkah-langkah perhitungannya dapat disajikan sebagai berikut :

Pertama-tama mengubah terlebih dahulu nilai sektor Xi tahun 1992 (tahun dasar 1983) menjadi nilai sektor Xi tahun 1992 (tahun dasar 1993), kemudian mengubah nilai sektor Xi tahun 1991 (tahun dasar 1983) menjadi nilai sektor Xi tahun 1991 (tahun dasar 1993), selanjutnya berturut-turut sampai dengan mengubah nilai sektor Xi tahun 1977 (tahun dasar 1975) menjadi nilai sektor Xi tahun 1977 (tahun dasar 1993). Nilai sektor Xi adalah besaran nilai sektor dalam PDRB yakni sektor pertanian; industri; perdagangan, hotel dan restoran; serta jasa-jasa.

Adapun cara perhitungan/ penyesuaian nilai sektor Xi tahun 1992 (tahun dasar 1983) menjadi nilai sektor Xi tahun 1992 (tahun dasar 1993) adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai Sektor Xi Th 1993 (Th dasar 1983)}}{\text{Nilai Sektor Xi Th 1992 (Th dasar 1983)}} \times \text{Nilai Sektor Xi Th dasar 1993} = Y$$

Y adalah merupakan hasil nilai sektor Xi tahun 1992 yang sudah bertahun dasar 1993.

Setelah nilai sektor Xi tahun 1992 (tahun dasar 1993) didapat yakni Y, kemudian dilakukan perhitungan/ penyesuaian nilai sektor Xi tahun 1991 (tahun dasar 1983) untuk dijadikan nilai sektor Xi tahun 1991 (tahun dasar 1993), dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai Sektor Xi Tahun 1992 (Tahun dasar 1983)}}{\text{Nilai Sektor Xi Tahun 1991 (Tahun dasar 1983)}} \times Y = \text{misal diperoleh nilai Z}$$

Z merupakan hasil nilai sektor Xi tahun 1991 yang sudah bertahun dasar 1993.

Demikian seterusnya dihitung untuk nilai sektor Xi tahun 1990 sampai dengan nilai sektor Xi tahun 1977.

Setelah masing-masing nilai sektor dihitung/ disamakan menjadi tahun dasar 1993, kemudian dihitung pertumbuhannya dengan rumusan perhitungan sebagai berikut : (Sadono Sukirno, 1994)

$$\text{Pertumbuhan Sektor } (X_{it}) = \frac{X_{it} - X_{i(t-1)}}{X_{i(t-1)}} \times 100\%$$

Dimana :

$X_{it}$  : Kontribusi sektor pertanian; sektor industri; sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa pada tahun t.

$X_{i(t-1)}$  : Kontribusi sektor pertanian; sektor industri; sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa pada tahun (t-1) atau tahun sebelumnya.

Selanjutnya terhadap variabel bebas yakni pendapatan per kapita yang data mentahnya juga terdiri atas harga konstan tahun dasar 1975 (1977 s/d 1982), tahun dasar 1983 (1983 s/d 1992) dan tahun dasar 1993 (1993 s/d 2000) juga harus disamakan terlebih dahulu ke tahun dasar 1993. Adapun perhitungannya sama dengan perhitungan yang dilakukan terhadap sektor-sektor dominan dalam PDRB tersebut diatas.

Tahap berikutnya mengestimasi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap derajat kemandirian fiskal (DKF), dimana dilakukan dengan membandingkan model regresi linier berganda biasa terhadap model regresi linier berganda dinamis yang menggunakan metode OLS dengan model PAM. Model PAM dikatakan sah untuk estimasi apabila koefisien kelambanan variabel tidak bebas ( $DKF_{t-1}$ ) yakni  $\beta_7$  memenuhi persyaratan terletak  $0 < \beta_7 < 1$  dan  $\beta_7$  harus signifikan secara statistik dengan tanda koefisien positif (J. Supranto, 1983 dan Modul Pelatihan Ekonometrika Dasar, 2000).

Selanjutnya jika persyaratan diatas terpenuhi, maka dapat dihitung koefisien estimasi jangka panjangnya dengan rumus : (Modul Pelatihan Ekonometrika Dasar, 2000)

$$\text{Konstanta} = \beta_0 / (1 - \beta_7)$$

$$\text{Yk} = \beta_1 / (1 - \beta_7)$$

$$\text{Tan} = \beta_2 / (1 - \beta_7)$$

$$\text{Ind} = \beta_3 / (1 - \beta_7)$$

$$\text{Dag} = \beta_4 / (1 - \beta_7)$$

$$\text{Jasa} = \beta_5 / (1 - \beta_7)$$

$$\text{G} = \beta_6 / (1 - \beta_7)$$

Untuk mencari model terbaik perlu dilakukan uji statistik guna mengetahui signifikansi nilai t statistik, F statistik dan koefisien determinasi/  $R^2$  (Gujarati, 1995). Uji t statistik untuk melihat pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara individu. Nilai t yang signifikan adalah lebih besar dari t tabel pada tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) yang ditentukan. F statistik bermanfaat untuk melihat pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara simultan. F statistik yang signifikan lebih besar dari F Tabel pada tingkat resiko kesalahan ( $\alpha$ ) yang diambil.

Cara lain yang lebih praktis adalah dengan membandingkan nilai probabilitas (sign) dengan  $\alpha = 5\%$ . Bila probabilitas kesalahan lebih kecil dari  $\alpha$ , maka  $H_0$  ditolak dan berarti memiliki pengaruh yang berarti. Namun bila probabilitas  $> \alpha$ , berarti pengaruhnya tidak signifikan.

Uji ekonometrik atau uji asumsi klasik untuk mendeteksi keberadaan multikolinieritas, heteroskedasitas, otokorelasi dan normalitas.

Multikolinieritas, menurut Frisch dikemukakan bahwa suatu model regresi dikatakan terkena multikolinieritas bila terjadi hubungan linier yang *perfect atau exact* di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan. Terjadinya multikolinieritas yang rawan pada model regresi bisa dideteksi keberadaannya bila  $R^2$  dari auxiliary regression melebihi  $R^2$  regresi keseluruhan antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas model yang diteliti. Selain itu jika nilai VIF lebih besar dari 10 maka variabel bebas tersebut

memiliki persoalan multikolinieritas (Modul Pelatihan Ekonometrika Dasar, 2000).

Heteroskedastisitas merupakan fenomena terjadinya perbedaan varian antar seri data. Heteroskedastisitas muncul apabila nilai varian dari variabel tak bebas ( $Y_i$ ) meningkat sebagai meningkatnya varian dari variabel bebas ( $X_i$ ), maka varian dari  $Y_i$  adalah tidak sama. Gejala heteroskedastisitas lebih sering dalam data *cross section* dari pada *time series*. Selain itu juga sering muncul dalam analisis yang menggunakan data rata-rata. Untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas digunakan metode grafik scatterplot (Singgih Santoso, 2000). Selain itu uji heteroskedastisitas juga akan dilakukan dengan uji White. Dengan uji White, suatu model dikatakan lolos adanya heteroskedastisitas apabila nilai probabilitas observasi  $R^2$  lebih besar dibandingkan tingkat resiko kesalahan yang diambil (Modul Pelatihan Ekonometrika Dasar, 2000)

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data *time series*) atau ruang (seperti dalam data *cross section*). Autokorelasi pada umumnya lebih sering terjadi pada data *time series* walaupun dapat juga terjadi pada data *cross section*. Dalam data *time series* observasi diurutkan menurut urutan waktu secara kronologis. Maka dari itu besar kemungkinan akan terjadi interkorelasi antara observasi yang berurutan, khususnya kalau interval antara dua observasi sangat pendek. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilakukan uji Durbin Watson (DW), namun uji DW ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intersep dalam model

regresi dan tidak adanya variabel lag diantara variabel penjelas. Jadi statistik  $d$  dari Durbin Watson tidak bisa digunakan untuk mendeteksi serial korelasi dalam model autoregressif. Untuk itu Durbin menyarankan dilakukan uji autokorelasi dengan menggunakan statistik  $h$  (Gujarati, 1995). Statistik  $h$  mengikuti distribusi normal yang distandarisasikan, yaitu distribusi normal dengan rata-rata nol dan varian satu. Dari distribusi normal dengan derajat kepercayaan 5% diketahui bahwa :

$$\Pr(-1,96 \leq h \leq 1,96) = 0,95$$

Untuk mendapatkan nilai  $h$  digunakan rumus :

$$h = \left(1 - \frac{1}{2}d\right) \sqrt{\frac{n}{1 - n[\text{var}(\hat{\alpha}_2)]}}$$

Jadi untuk memutuskan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut :

(Gujarati, 1995)

1. Jika  $h > 1,96$  tolak hipotesis nol yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif.
2. Jika  $h < -1,96$  tolak hipotesis nol yang menyatakan tidak ada autokorelasi negatif.

Tetapi jika  $h$  terletak antara  $-1,96$  dan  $1,96$  hipotesis nol yang menyatakan tidak ada autokorelasi (positif atau negatif) tidak boleh ditolak.

Uji normalitas untuk mengetahui normal tidaknya distribusi faktor gangguan (residual) yakni dilakukan dengan menggunakan metode grafik. Proses uji normalitas data dilakukan dengan memperhatikan penyebaran data (titik) pada

*Normal P-Plot of Regression Standardized Residual* dari variabel terikat, dimana :  
(Singgih Santoso, 2000)

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka distribusi faktor gangguan (residual) memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka distribusi faktor gangguan tidak memenuhi asumsi normalitas.

Pengujian normalitas pada penelitian ini juga menggunakan uji Jarque-Bera. Uji ini menggunakan hasil estimasi residual dan *chi-square probability distribution*. Adapun langkah-langkah untuk mendapatkan nilai J-B hitung adalah sebagai berikut :

1. Menghitung nilai Skewness dan Kurtosis.
2. Menghitung nilai J-B hitung.
3. Membandingkan nilai J-B hitung yang diasumsikan sama dengan nilai  $\chi^2$  hitung dengan nilai  $\chi^2$  tabel.

#### **3.4 Definisi Operasional Variabel.**

Setelah data-data mentah yang akan dianalisis dilakukan penyesuaian, selanjutnya data hasil penyesuaian tersebut digunakan untuk mencari nilai dari pada variabel tidak bebas (DKF) maupun variabel bebas (Yk, Tan, Ind, Dag, Jasa dan G) sehingga definisi operasional variabel untuk analisis regresi menjadi sebagai berikut :

DKF<sub>t</sub> : Derajat kemandirian fiskal adalah rasio PAD terhadap total penerimaan APBD kabupaten Banjarnegara (tidak termasuk transfer

- pemerintah pusat) pada tahun yang sama, dinyatakan dalam persen.
- $Yk_t$  : Pendapatan rata-rata penduduk di wilayah administrasi kabupaten Banjarnegara pada periode waktu tertentu, dinyatakan dalam rupiah. Namun dalam operasionalnya, nilai  $Yk_t$  tersebut sebelumnya di  $\ln$  (log natural) terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan untuk mencari elastisitas dan selain itu juga bermanfaat untuk menghindari kemungkinan munculnya heteroskedastisitas.
- $Tan_t$  : Pertumbuhan per tahun sektor pertanian dalam PDRB kabupaten Banjarnegara berdasar harga konstan tahun 1993, dinyatakan dalam persen.
- $Ind_t$  : Pertumbuhan per tahun sektor industri dalam PDRB kabupaten Banjarnegara berdasar harga konstan tahun 1993, dinyatakan dalam persen.
- $Dag_t$  : Pertumbuhan per tahun sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam PDRB kabupaten Banjarnegara berdasar harga konstan tahun 1993, dinyatakan dalam persen.
- $Jasa_t$  : Pertumbuhan per tahun sektor jasa-jasa dalam PDRB kabupaten Banjarnegara berdasar harga konstan tahun 1993, dinyatakan dalam persen.
- $G_t$  : Bantuan yang diterima pemerintah kabupaten Banjarnegara dari pemerintah pusat dalam periode tahun anggaran tertentu, diukur dengan menggunakan rasio nilai bantuan terhadap total transfer (sumbangan dan bantuan), dinyatakan dalam persen.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

#### **4.1. Keadaan APBD Kabupaten Banjarnegara**

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, pemerintah daerah kabupaten Banjarnegara tentunya memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia dan dituntut untuk bisa lebih mandiri. Terlebih dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka harus bisa mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki dengan semaksimal mungkin serta tidak terlalu mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan yang telah disusun melalui APBD.

APBD merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan instruksi menteri dalam negeri serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi APBD mudah dilakukan. Pada sisi lain APBD dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja.

##### **4.1.1. Perkembangan APBD**

Pertumbuhan APBD di kabupaten Banjarnegara tahun anggaran 1996/1997 s/d tahun anggaran 2000 mengalami peningkatan rata-rata 37,74 % yaitu dari Rp. 28.212.844.514,- pada tahun anggaran 1996/1997 meningkat menjadi Rp. 89.124.200.000,- pada tahun anggaran 2000. Khusus pada tahun anggaran

2000 pertumbuhan mengalami penurunan sebesar - 6,45 %, hal ini disebabkan APBD yang ada hanya berjalan 9 (sembilan) bulan yang dimulai dari April 2000 s/d Desember 2000.

Meskipun disadari bahwa selama periode di atas perubahan APBD yang terjadi setiap tahun tidak sama, namun kecenderungan selalu meningkat terus dari tahun ketahun. Selama periode tersebut jumlah APBD secara keseluruhan mencapai sebesar Rp. 323.856.287.514,-. Gambaran tentang perkembangan dan rata-rata pertumbuhan APBD kabupaten Banjarnegara tahun anggaran 1996/1997 s/d 2000 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Perkembangan APBD Kabupaten Banjarnegara**

| No. | Tahun Anggaran | APBD<br>(Rupiah)  | Pertumbuhan<br>(%) |
|-----|----------------|-------------------|--------------------|
| 1.  | 1996/1997      | 28.212.844.514    | -                  |
| 2.  | 1997/1998      | 38.037.534.000    | 34.82              |
| 3.  | 1998/1999      | 73.210.559.000    | 92.47              |
| 4.  | 1999/2000      | 95.271.150.000    | 30.13              |
| 5.  | 2000           | 89.124.200.000    | - 6.45             |
|     | Rata-rata      | 64.771.257.502,80 | 37.74              |

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemda Tingkat II Jateng dari beberapa terbitan (data diolah)

#### 4.1.2. Kontribusi PAD Terhadap APBD

Pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah untuk membiayai kegiatan rutin dan pembangunan diharapkan akan semakin meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Hal tersebut diperlukan karena dengan diberlakukannya UU otonomi daerah, maka daerah harus bisa membiayai segala kegiatan pembangunan dengan PAD yang ada.

Adapun besarnya kontribusi PAD terhadap APBD di kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

**Tabel 4.2**  
**Kontribusi PAD Terhadap APBD Kabupaten Banjarnegara**

| No | Tahun Anggaran | Jumlah APBD (Rp.) | Jumlah PAD (Rp.) | Kontribusi PAD (%) |
|----|----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 1. | 1996/1997      | 28.212.844.514    | 3.725.388.133    | 13,20              |
| 2. | 1997/1998      | 38.037.534.000    | 4.294.535.000    | 11,29              |
| 3. | 1998/1999      | 73.210.559.000    | 7.202.657.000    | 9,84               |
| 4. | 1999/2000      | 95.271.150.000    | 5.457.020.000    | 5,73               |
| 5. | 2000           | 89.124.200.000    | 4.769.553.000    | 5,35               |
|    | Rata-rata      | 64.771.257.502,80 | 5.089.830.626,60 | 9,082              |

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemda Tingkat II Jateng, dari beberapa terbitan (data diolah)

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa selama 5 (lima) tahun sejak tahun anggaran 1996/1997 s/d tahun anggaran 2000 kontribusi PAD terhadap APBD rata-rata 9,082 %. Hal ini memperlihatkan peranan yang sangat kecil, sehingga menuntut adanya perhatian sungguh-sungguh dari aparat pemerintah terkait untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan kecilnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan APBD suatu daerah yakni : (Elia Radianto, 1997)

1. Banyak sumber yang sebenarnya dapat digali tetapi belum tergali secara optimal bahkan ada yang belum tersentuh sama sekali.
2. Badan usaha milik daerah belum bekerja secara optimal.
3. Rendahnya pendapatan per kapita masyarakat.
4. Kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber yang ada, karena kurang tersedianya atau kurang memadainya infrastruktur.

#### 4.1.3. Kontribusi Sumbangan dan Bantuan Terhadap APBD

Sumbangan dan bantuan adalah anggaran yang bersumber dari pemerintah atau instansi yang lebih tinggi. Untuk mengetahui proporsi anggaran, kedua sumber anggaran tersebut perlu diketahui karena semakin besar alokasi anggaran pusat ke daerah memungkinkan terjadinya campur tangan yang lebih besar terhadap berbagai aktifitas di daerah.

Adapun kontribusi sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut :

**Tabel 4.3.**  
**Kontribusi Sumbangan dan Bantuan Terhadap APBD**

| Tahun Anggaran | Jumlah APBD (Rp.) | Kontribusi Sumbangan |        | Kontribusi Bantuan |       |
|----------------|-------------------|----------------------|--------|--------------------|-------|
|                |                   | Jumlah (Rp.)         | (%)    | Jumlah (Rp.)       | (%)   |
| 1996/1997      | 28.212.844.514    | 6.926.260.217        | 24,55  | 9.998.196.689      | 35,44 |
| 1997/1998      | 38.037.534.000    | 15.755.606.000       | 41,42  | 11.465.537.000     | 30,14 |
| 1998/1999      | 73.210.559.000    | 45.540.838.000       | 62,21  | 14.184.506.000     | 19,37 |
| 1999/2000      | 95.271.150.000    | 67.113.930.000       | 70,45  | 16.915.115.000     | 17,75 |
| 2000           | 89.124.200.000    | 61.887.936.000       | 69,44  | 13.986.541.000     | 15,69 |
| Rata-rata      | 64.771.257.502,8  | 39.444.914.043,4     | 53,614 | 13.309.979.137,8   | 23,68 |

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemda Tingkat II Jateng, dari beberapa terbitan, (data diolah).

Pada tabel 4.3 diatas terlihat bahwa selama 5 (lima) tahun yakni sejak tahun anggaran 1996/1997 s/d tahun anggaran 2000 kontribusi sumbangan terhadap APBD sebesar rata-rata Rp. 39.444.914.043,40,- atau rata-rata 53,614 %, sedangkan kontribusi bantuan rata-rata sebesar Rp. 13.309.979.137,8,- atau rata-rata 23,68 %. Dengan demikian peranan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat tinggi atau dengan kata lain bahwa kemandirian kabupaten Banjarnegara relatif masih rendah.

Selanjutnya perkembangan transfer (sumbangan dan bantuan) dari pemerintah pusat untuk kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut :

**Tabel 4.4.**  
**Perkembangan Transfer (Sumbangan/ Bantuan)**  
**dari Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Banjarnegara**

| Tahun Anggaran | Sumbangan (Rupiah) | Bantuan (Rupiah)  | Total Transfer (Rupiah) | Pertumbuhan (%) |
|----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| 1996/1997      | 6.926.260.217      | 9.998.196.689     | 16.924.456.906          | -               |
| 1997/1998      | 15.755.606.000     | 11.465.537.000    | 27.221.143.000          | 60,84           |
| 1998/1999      | 45.540.838.000     | 14.184.506.000    | 59.725.344.000          | 119,41          |
| 1999/2000      | 67.113.930.000     | 16.915.115.000    | 84.029.045.000          | 40,69           |
| 2000           | 61.887.936.000     | 13.986.541.000    | 75.874.477.000          | -9,70           |
| Rata-rata      | 39.444.914.043,4   | 13.309.979.137,80 | 52.754.893.181,20       | 42,248          |

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemda Tingkat II Jateng, dari beberapa terbitan, (data diolah).

Melihat perkembangan selama kurun waktu tahun anggaran 1996/1997 s/d tahun anggaran 2000, nilai transfer dari pemerintah pusat (sumbangan dan bantuan) yang diterima rata-rata Rp. 52.754.893.181,20,- atau rata-rata pertumbuhan sebesar 42,248 % per tahun. Pertumbuhan yang mencolok terjadi pada tahun anggaran 1998/1999 yakni sebesar 119,41 %, hal ini dapat dimengerti mengingat pada masa tersebut sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat karena tuntutan pembiayaan pembangunan dan implikasi dari krisis ekonomi dan moneter sejak pertengahan tahun 1997.

Kemudian pada tahun anggaran 2000 pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar -9,70 %, hal ini terjadi mengingat pada tahun anggaran 2000 hanya terdapat 9 bulan yang dimulai bulan dari April s/d Desember.

Kondisi riil selama ini sumbangan dan bantuan masih mendominasi dari sisi penerimaan pendapatan kabupaten Banjarnegara untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang semakin lebih baik, nantinya dapat meminimalkan ketergantungan dari sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat.

#### **4.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banjarnegara.**

Gambaran produk domestik regional bruto kabupaten Banjarnegara menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 1993 dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 1996 s/d tahun 2000 seperti terlihat pada tabel 4.5 nampak mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,27 persen per tahun.

Dari 9 sektor ekonomi yang ada, terdapat 4 sektor yang cukup relatif tinggi peran atau kontribusinya terhadap PDRB yaitu sektor pertanian menduduki peringkat teratas yakni rata-rata sebesar 42 %, disusul berturut-turut sektor industri rata-rata sebesar 15,47 %, sektor jasa rata-rata sebesar 14,49 % dan sektor perdagangan, hotel dan restoran rata-rata sebesar 12,80 %. Sedangkan sektor-sektor ekonomi lainnya relatif tidak begitu besar dibawah 6 %.

Dengan demikian bahwa peran sektor pertanian, industri, perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa lebih dominan dibanding sektor lain dalam perekonomian di kabupaten Banjarnegara, meskipun ada fluktuasi antara tahun 1996 s/d tahun 2000. Adanya fluktuasi terhadap peran sektor ekonomi diatas sudah barang tentu membawa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Selanjutnya dilihat dari rata-rata pertumbuhan per tahun dari 4 sektor dominan yang ada, 3 sektor diantaranya menunjukkan pertumbuhan negatif dan 1 sektor menunjukkan pertumbuhan positif. Ketiga sektor tersebut yaitu sektor pertanian sebesar  $-1,07\%$ , sektor industri sebesar  $-3,41\%$  dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar  $-2,65\%$ . Sedang 1 sektor lainnya yakni sektor jasa-jasa sebesar  $7,84\%$ .

Selanjutnya 5 sektor lainnya, 4 sektor diantaranya menunjukkan pertumbuhan positif dan 1 sektor menunjukkan pertumbuhan negatif. Keempat sektor tersebut yakni sektor pertambangan & penggalian rata-rata sebesar  $0,24\%$ , sektor listrik-gas & air minum rata-rata sebesar  $7,83\%$ , sektor angkutan rata-rata sebesar  $8,11\%$  dan sektor bank & lembaga keuangan rata-rata sebesar  $1,43\%$ . Sedang satu sektor lainnya yakni sektor bangunan rata-rata sebesar  $-5,80\%$ . Untuk lebih jelasnya uraian tersebut diatas diperlihatkan pada tabel 4.5 sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banjarnegara**  
**Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993**  
**(dalam Ribuan Rp.)**

| Lapangan Usaha                     | 1996        | %     | 1997        | %     | 1998        | %     | 1999        | %     | 2000        | %     | Rata-rata Distribusi thd Total (%) | Rata-rata Pertumbuhan per Tahun (%) |
|------------------------------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Pertanian                       | 360.222.558 | 41,84 | 363.573.582 | 41,5  | 378.869.649 | 45,12 | 347.431.196 | 41,18 | 343.473.820 | 40,37 | 42,00                              | -1,07                               |
| Tanaman Bahan Makanan              | 307.240.336 | 35,69 | 305.274.382 | 34,85 | 323.477.285 | 38,52 | 305.131.178 | 36,17 | 297.054.184 | 34,91 | 36,03                              | -0,75                               |
| Tanaman Perkebunan                 | 32.624.422  | 3,79  | 30.817.619  | 3,52  | 34.553.940  | 4,11  | 22.667.007  | 2,69  | 25.548.001  | 3,00  | 3,42                               | -3,78                               |
| Peternakan                         | 9.802.015   | 1,14  | 11.466.233  | 1,31  | 9.749.989   | 1,16  | 8.469.024   | 1,00  | 9.683.956   | 1,14  | 1,15                               | 0,80                                |
| Kelutanan                          | 6.999.944   | 0,81  | 5.856.541   | 0,67  | 6.259.444   | 0,75  | 6.051.495   | 0,72  | 6.075.743   | 0,71  | 0,73                               | -3,09                               |
| Perikanan                          | 3.555.841   | 0,41  | 4.158.907   | 0,48  | 4.828.992   | 0,58  | 5.111.843   | 0,61  | 5.111.287   | 0,60  | 0,53                               | 9,73                                |
| 2. Pertambangan & Pengalihan       | 4.531.660   | 0,53  | 4.215.485   | 0,48  | 4.432.988   | 0,53  | 4.532.889   | 0,54  | 4.556.055   | 0,54  | 0,52                               | 0,24                                |
| 3. Industri                        | 144.270.797 | 16,76 | 141.689.871 | 16,17 | 125.537.743 | 14,95 | 124.769.472 | 14,79 | 124.966.864 | 14,70 | 15,47                              | -3,41                               |
| 4. Listrik, Gas & Air Minum        | 2.842.969   | 0,33  | 2.767.582   | 0,32  | 3.039.358   | 0,36  | 3.331.872   | 0,40  | 3.815.764   | 0,45  | 0,37                               | 7,83                                |
| 5. Bangunan                        | 61.624.775  | 7,16  | 48.870.347  | 5,58  | 47.575.155  | 5,66  | 46.937.092  | 5,56  | 47.630.171  | 5,60  | 5,91                               | -5,80                               |
| 6. Perdagangan, hotel & restoran   | 116.537.592 | 13,54 | 113.537.520 | 12,96 | 108.013.994 | 12,86 | 104.369.418 | 12,37 | 104.588.839 | 12,30 | 12,80                              | -2,65                               |
| 7. Angkutan                        | 29.330.000  | 3,41  | 37.752.494  | 4,31  | 36.220.235  | 4,31  | 41.103.773  | 4,87  | 38.758.915  | 4,56  | 4,29                               | 8,11                                |
| 8. Bank & Lembaga Keuangan lainnya | 38.562.681  | 4,48  | 38.956.825  | 4,45  | 30.390.116  | 3,62  | 36.999.500  | 4,39  | 38.823.442  | 4,56  | 4,30                               | 1,43                                |
| 9. Jasa-jasa                       | 111.032.169 | 12,90 | 123.713.125 | 14,12 | 105.668.734 | 12,58 | 134.217.653 | 15,91 | 144.289.261 | 16,69 | 14,49                              | 7,84                                |
| PDRB                               | 860.955.280 | 100   | 876.076.837 | 100   | 839.747.973 | 100   | 843.682.860 | 100   | 850.903.131 | 100   | 100                                | -0,27                               |

Sumber : BPS, Banjarnegara dalam angka tahun 2001, (data diolah).

### **4.3. Diskripsi Sektor-sektor Dominan dalam PDRB Kabupaten Banjarnegara.**

#### **4.3.1. Sektor Pertanian**

Dalam tabel 4.5 terlihat bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 1996 s/d tahun 2000 sektor pertanian merupakan sektor yang paling tinggi diantara sektor lainnya dalam kontribusinya terhadap PDRB yaitu rata-rata sebesar 42,00 %, namun dalam kurun waktu tersebut mengalami pertumbuhan menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -1,07 %.

#### **4.3.2. Sektor Industri**

Sektor industri merupakan sektor penting selain sektor pertanian di kabupaten Banjarnegara. Sektor industri dibedakan menjadi industri besar dengan tenaga kerja 100 orang atau lebih, industri sedang dengan tenaga kerja 20 -- 99 orang, industri kecil dengan tenaga kerja 5 – 19 orang dan industri rumah tangga dengan tenaga kerja 1 – 4 orang. Untuk industri besar/ sedang ada 23 perusahaan, industri kecil sebanyak 345 perusahaan dan industri rumah tangga sebanyak 22.724 usaha (Banjarnegara dalam angka tahun 2001).

Dalam tabel 4.5 dapat dilihat perkembangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 1996 s/d tahun 2000, menunjukkan penurunan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -3.41 % per tahun. Sektor ini menempati urutan kedua setelah sektor pertanian dalam kontribusinya terhadap PDRB yakni rata-rata sebesar 15,47 %.

#### 4.3.3. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Dalam tabel 4.5 dapat dilihat bahwa sektor ini menempati urutan keempat setelah sektor jasa dalam kontribusinya terhadap PDRB yakni rata-rata sebesar 12,80 %. Selama kurun waktu tahun 1996 s/d tahun 2000 sektor ini menunjukkan penurunan dengan pertumbuhan yakni rata-rata sebesar -2,65 persen per tahun.

#### 4.3.4. Sektor Jasa-jasa

Disamping sektor lainnya, sektor jasa-jasa juga merupakan sektor yang cukup penting dalam perekonomian di kabupaten Banjarnegara, mengingat kedudukannya pada urutan ketiga setelah sektor industri dalam kontribusinya terhadap PDRB yakni rata-rata sebesar 14,49 %. Selain itu selama kurun waktu tahun 1996 s/d tahun 2000 seperti terlihat pada tabel 4.5. menunjukkan peningkatan yakni dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,84 persen per tahun.

#### 4.4. Perkembangan Pendapatan per kapita

Mengenai gambaran perkembangan pendapatan per kapita di kabupaten Banjarnegara diperlihatkan pada tabel 4.6 sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Perkembangan Pendapatan per kapita Kabupaten Banjarnegara**  
**Tahun 1996-2000**

| Tahun | Pendapatan per kapita<br>(dlm Rupiah) | Pertumbuhan<br>(%) |
|-------|---------------------------------------|--------------------|
| 1996  | 1.009.398                             | -                  |
| 1997  | 1.005.544                             | -0,38              |
| 1998  | 946.609                               | -5,86              |
| 1999  | 945.750                               | -0,09              |
| 2000  | 948.026                               | 0.24               |

Sumber: BPS, Banjarnegara dalam angka tahun 2001, (data diolah).

Dari tabel 4.6 memperlihatkan bahwa pertumbuhan pendapatan per kapita di kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan pada tahun 2000 yaitu sebesar 0,24 %, hal ini cukup baik mengingat sebelumnya masih mengalami pertumbuhan negatif, namun terjadi peningkatan yakni sebesar -5,86 % pada tahun 1998 menjadi -0.09 % pada tahun 1999. Terjadinya fluktuasi pertumbuhan pendapatan per kapita tersebut bisa dimaklumi karena mulai pertengahan tahun 1997 terjadi krisis moneter yang berlanjut pada krisis ekonomi.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Analisis Diskriptif

Kondisi perekonomian Kabupaten Banjarnegara saat ini masih menunjukkan besarnya tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, sehingga diyakini bahwa perekonomian akan mudah sekali bergejolak yang berakibat pada melemahnya kegiatan ekonomi. Dengan pertimbangan tersebut, maka dalam jangka panjang perlu diupayakan langkah-langkah untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan baik rutin maupun pembangunan. Sebagai indikator dalam menganalisis tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat adalah kemampuan fiskal daerah atau lebih populer disebut Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF).

Dalam struktur keuangan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) dipandang sebagai kemampuan riil keuangan daerah. Sebagaimana telah dikemukakan, PAD diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Faktor kemampuan daerah diukur dari tiga indikator (Sukanto Reksohadiprojo, 1999), yaitu besarnya PAD terhadap total penerimaan daerah (TPD atau APBD), besarnya bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) terhadap TPD, serta sumbangan dan bantuan (S/B) terhadap TPD.

Secara ringkas, gambaran kemampuan keuangan Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Rekapitulasi perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal**  
**Kabupaten Banjarnegara T.A. 1977/1978 – 2000**  
**(dalam persen)**

| TAHUN<br>ANGGARAN | PAD/TPD | BHPBP/TPD | SB/TPD |
|-------------------|---------|-----------|--------|
| 1977/1978         | 14.43   | 12.97     | 72.60  |
| 1978/1979         | 9.70    | 9.40      | 80.89  |
| 1979/1980         | 14.43   | 12.97     | 72.60  |
| 1980/1981         | 11.77   | 12.09     | 76.14  |
| 1981/1982         | 14.37   | 9.27      | 76.36  |
| 1982/1983         | 18.87   | 10.74     | 70.39  |
| 1983/1984         | 24.70   | 8.61      | 66.69  |
| 1984/1985         | 24.46   | 8.29      | 67.25  |
| 1985/1986         | 22.03   | 7.63      | 70.33  |
| 1986/1987         | 24.33   | 8.99      | 66.68  |
| 1987/1988         | 36.06   | 8.67      | 55.27  |
| 1988/1989         | 23.92   | 4.79      | 71.29  |
| 1989/1990         | 15.28   | 8.17      | 76.55  |
| 1990/1991         | 14.19   | 6.30      | 79.51  |
| 1991/1992         | 11.82   | 5.75      | 82.44  |
| 1992/1993         | 14.38   | 6.38      | 79.24  |
| 1993/1994         | 13.70   | 8.45      | 77.85  |
| 1994/1995         | 18.58   | 11.22     | 70.20  |
| 1995/1996         | 18.11   | 12.01     | 69.88  |
| 1996/1997         | 15.01   | 16.79     | 68.20  |
| 1997/1998         | 11.66   | 14.46     | 73.89  |
| 1998/1999         | 10.17   | 6.68      | 83.15  |
| 1999/2000         | 6.28    | 6.42      | 87.30  |
| 2000              | 5.56    | 8.20      | 86.24  |
| Rata-Rata         | 16.41   | 9.38      | 74.21  |

Sumber : BPS Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II Jateng dari beberapa terbitan, (data diolah).

Dari hasil perhitungan dalam tabel 5.1 diatas terlihat bahwa rata-rata dalam kurun waktu 24 tahun (1977/1978 s/d 2000) diperoleh proporsi PAD terhadap TPD rata-rata sebesar 16,41 %. Pada kurun waktu tersebut proporsi penerimaan PAD terhadap TPD menunjukkan penurunan terutama pada enam

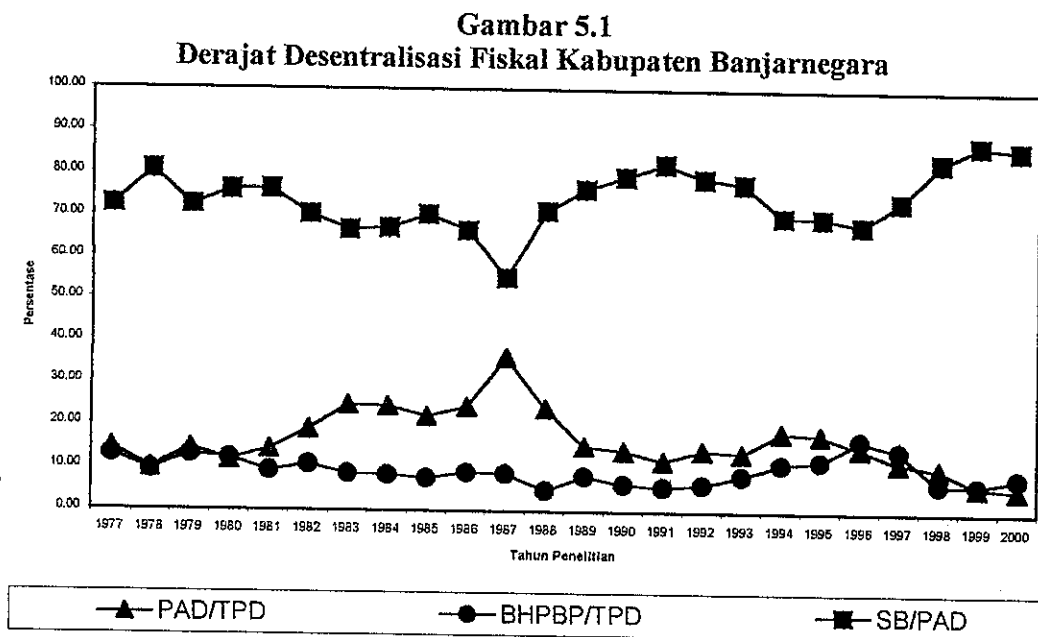
tahun terakhir, dari 18,11 % pada tahun 1995/1996 menjadi 5,56 % pada tahun 2000. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan kontribusi PAD dimana hal ini bisa saja terjadi karena kemungkinan adanya penurunan dari pos-pos penerimaan daerah baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah. Disamping itu khusus pada tahun anggaran 2000, waktu tahun anggarannya hanya sembilan bulan. Selain itu juga bisa terjadi sebagai akibat adanya dampak dari krisis ekonomi yang sedang berlangsung mulai pertengahan tahun 1997 hingga sekarang.

Kemudian proporsi BHPBP terhadap TPD dalam kurun waktu dari tahun 1977/1978 s/d 2000 secara rata-rata sebesar 9,38 % dimana jika diperhatikan perkembangannya menunjukkan adanya fluktuasi. Penurunan kontribusi BHPBP yang cukup besar terjadi pada empat tahun terakhir yakni pada tahun 1997/1998 proporsinya sebesar 14,46 % mengalami penurunan sebesar 6,42 % pada tahun 1999/2000. Hal ini bisa dimungkinkan sebagai dampak terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Selanjutnya untuk proporsi S/B terhadap TPD menunjukkan perolehan rata-rata sebesar 74,21 %. Kontribusi sumbangan dan bantuan dapat dikatakan merupakan unsur yang paling dominan dalam penerimaan daerah Kabupaten Banjarnegara. Dalam kurun waktu tahun 1997/1998 s/d 2000 kontribusi sumbangan dan bantuan menunjukkan adanya fluktuasi, terlebih dalam tahun 1998/1999 s/d 2000 proporsi sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat mencapai lebih dari 80 %. Namun jika dikaji lebih dalam ketergantungan yang semakin tahun semakin relatif membesar ini terdapat beberapa hal yang menyebabkan antara lain adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan, perubahan

struktur anggaran (gaji guru SD yang masuk dalam APBD, kenaikan gaji pegawai negeri sipil) dan proyek-proyek pembangunan yang akan memperbesar total APBD yang sumber penerimaannya antara lain berasal dari dana sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat.

Untuk memperjelas gambaran derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Banjarnegara pada gambar 5.1 diperlihatkan grafik sebagai berikut :



Dari perhitungan diatas telah disebutkan bahwa untuk proporsi PAD terhadap TPD diperoleh hasil rata-rata sebesar 16,42 %. Dengan hasil tersebut berdasarkan kriteria derajat desentralisasi fiskal yang dibuat oleh Badan Litbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991), maka derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Banjarnegara berada diantara 10,1 % s/d 20 % sehingga dikategorikan kurang.

Kemudian untuk proporsi BHPBP terhadap TPD diperoleh hasil rata-rata sebesar 9,83 %. Dengan hasil tersebut berdasarkan kriteria derajat desentralisasi fiskal yang dibuat oleh Badan Litbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991), maka

derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Banjarnegara berada diantara 0 % s/d 10 % sehingga dikategorikan sangat kurang.

Selanjutnya perhitungan untuk proporsi S/B terhadap TPD diperoleh hasil rata-rata sebesar 74,21 %, hal ini berarti 25,79 % merupakan komponen lain di luar sumbangan dan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat. Dengan hasil tersebut berdasarkan kriteria derajat desentralisasi fiskal yang dibuat oleh Badan Litbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991), maka derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Banjarnegara berada diantara 20,1 % s/d 30 % sehingga dikategorikan cukup.

Dengan demikian secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara dalam kesiapannya menghadapi otonomi daerah ditinjau dari derajat desentralisasi fiskal dinilai masih kurang. Hal ini terlihat dari kontribusi PAD dan BHPBP yang sangat rendah. Sebaliknya juga terlihat dari kontribusi S/B yang relatif semakin besar, hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih cukup besar.

Berkaitan dengan hal tersebut maka kiranya pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu segera melakukan pembenahan-pembenahan baik yang bersifat administratif maupun teknis. Hal ini sebagai upaya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang utamanya untuk peningkatan PAD. Dengan meningkatnya PAD paling tidak nantinya dapat dijadikan tumpuan atau andalan dalam pembiayaan baik rutin maupun pembangunan. Selain itu tidak kalah pentingnya diharapkan secara bertahap dapat mengurangi tingkat ketergantungan fiskal dari pemerintah pusat.

Untuk itu setidaknya ada dua hal penting yang perlu diperhatikan yakni evaluasi ke dalam dan evaluasi keluar. Evaluasi ke dalam merupakan evaluasi mengenai bagaimana kondisi sumberdaya manusia dan profesionalisme aparat, seta bagaimana intensitas melaksanakan pemungutan atau penarikan pajak dan retribusi. Sedangkan evaluasi keluar lebih pada untuk lebih meningkatkan pendekatan terhadap wajib pajak dan masyarakat seperti upaya untuk menggunakan sistem jemput bola ataupun sistem-sistem lain yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar aktif membayar pajak atau retribusi.

## 5.2. Hasil Estimasi Model Regresi Dinamis

Berdasarkan estimasi dengan menggunakan model linear dinamis penyesuaian parsial atau *Partial Adjustment Model* (PAM) terhadap derajat kemandirian fiskal di Kabupaten Banjarnegara hasilnya dapat dilihat pada Lampiran 7 – 2. Namun secara ringkas hasilnya dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut :

**Tabel 5.2**  
**Hasil Estimasi Model PAM**

| Model | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig.    |      |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|---------|------|
|       | B                           | Std. Error | Beta                      |       |         |      |
| 1     | (Constant)                  | -1.727     | .100                      |       |         |      |
|       | lnYK                        | .162       | .008                      | .801  | 19.977  | .000 |
|       | TANt                        | 1.085E-02  | .001                      | .620  | 16.491  | .000 |
|       | INDt                        | 8.715E-04  | .000                      | .083  | 2.676   | .017 |
|       | DAGt                        | -3.83E-03  | .000                      | -.367 | -11.840 | .000 |
|       | JASAt                       | 1.073E-02  | .000                      | .867  | 26.877  | .000 |
|       | Gt                          | -.183      | .016                      | -.457 | -11.742 | .000 |
|       | DKFt1                       | .110       | .034                      | .108  | 3.193   | .006 |

a. Dependent Variable: DKFt

Dari hasil estimasi tersebut apabila dijabarkan ke dalam persamaan dapat ditulis sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 DKF_{t \text{ hitung}} = & -1,727 + 0,162 \ln Y_{kt} + 0,011 \text{ Tan}_t + 0,0008 \text{ Ind}_t - 0,0038 \text{ Dag}_t \\
 & (-17,246) \quad (19,977) \quad (16,491) \quad (2,676) \quad (-11,840) \\
 & + 0,011 \text{ Jasa}_t - 0,183 \text{ G}_t + 0,110 \text{ DKF}_{t-1} \\
 & (26,877) \quad (-11,742) \quad (3,193)
 \end{aligned}$$

$$F_{\text{hitung}} = 267,419$$

$$R^2 = 0,992$$

Keterangan :

- DKF<sub>t</sub> = derajat kemandirian fiskal
- LnY<sub>kt</sub> = pendapatan per kapita
- Tan<sub>t</sub> = pertumbuhan sektor pertanian
- Ind<sub>t</sub> = pertumbuhan sektor industri
- Dag<sub>t</sub> = pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran
- Jasa<sub>t</sub> = pertumbuhan sektor jasa-jasa
- G<sub>t</sub> = bantuan dari pemerintah pusat
- DKF<sub>t-1</sub> = derajat kemandirian fiskal satu tahun yang lalu

Nilai koefisien dari DKF<sub>t-1</sub> ternyata bertanda positif dan berpengaruh pada derajat kepercayaan sebesar 0,006. Hal ini berarti model PAM dapat digunakan untuk mengestimasi perkembangan derajat kemandirian fiskal Kabupaten Banjarnegara selama periode studi penelitian ini. Sebelum dilakukan interpretasi, terlebih dahulu akan dilakukan uji asumsi klasik.

### 5.3. Pengujian terhadap Asumsi Klasik

#### 5.3.1 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas dilakukan pada variabel-variabel bebas dengan menggunakan *auxiliary regression* (Lampiran 7 -- 3 s/d 9), hasilnya menunjukkan

bahwa semua variabel bebas pada model yang diajukan, bebas dari multikolinieritas. Hal ini ditunjukkan dengan indikator kecilnya nilai  $R^2$  pada *auxiliary regression* dari pada nilai  $R^2$  pada model persamaan yang diajukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.3 sebagai berikut :

**Tabel 5.3**  
**Perbandingan Nilai  $R^2$**

| Jenis Regresi            | Nilai $R^2$ |
|--------------------------|-------------|
| Regresi Model            | 0,992       |
| Auxiliary Regression I   | 0,670       |
| Auxiliary Regression II  | 0,625       |
| Auxiliary Regression III | 0,451       |
| Auxiliary Regression IV  | 0,448       |
| Auxiliary Regression V   | 0,491       |
| Auxiliary Regression VI  | 0,650       |
| Auxiliary Regression VII | 0,539       |

Selanjutnya pengujian ada tidaknya gejala multikolinieritas dengan cara yang lain dapat menggunakan nilai VIF dan Tolerance (Lampiran 7 – 10). Namun untuk lebih jelasnya hasilnya dapat dilihat pada tabel 5.4 sebagai berikut :

**Tabel 5.4**  
**Pengujian Multikolinieritas**

| Coefficients <sup>a</sup> |            |                             |            |                           |         |      |                         |       |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|---------|------|-------------------------|-------|
| Model                     |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t       | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|                           |            | B                           | Std. Error | Beta                      |         |      | Tolerance               | VIF   |
| 1                         | (Constant) | -1.727                      | .100       |                           | -17.246 | .000 |                         |       |
|                           | lnYK       | .162                        | .008       | .801                      | 19.977  | .000 | .330                    | 3.034 |
|                           | TANt       | 1.085E-02                   | .001       | .620                      | 16.491  | .000 | .375                    | 2.667 |
|                           | INDt       | 8.715E-04                   | .000       | .083                      | 2.676   | .017 | .549                    | 1.821 |
|                           | DAGt       | -3.83E-03                   | .000       | -.367                     | -11.840 | .000 | .552                    | 1.813 |
|                           | JASAt      | 1.073E-02                   | .000       | .867                      | 26.877  | .000 | .509                    | 1.965 |
|                           | Gt         | -.183                       | .016       | -.457                     | -11.742 | .000 | .350                    | 2.854 |
|                           | DKFt1      | .110                        | .034       | .108                      | 3.193   | .006 | .461                    | 2.170 |

a. Dependent Variable: DKFt

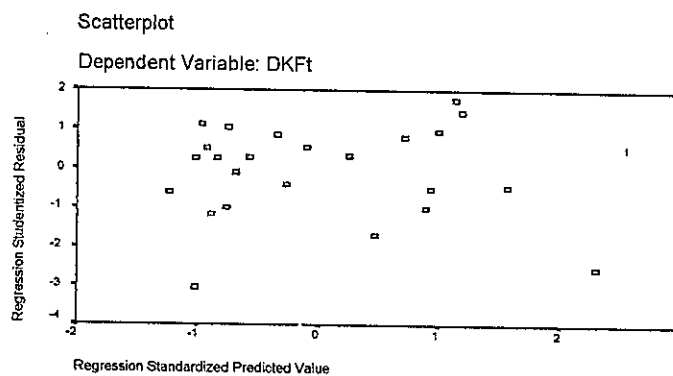
Dari uji regresi menunjukkan bahwa nilai VIF dari semua variabel yang

diuji tidak ada yang lebih besar dari 10. Hal tersebut berarti pada model regresi dalam penelitian ini tidak ditemukan gejala-gejala multikolinieritas.

### 5.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode grafik *scatterplot*, dimana hasilnya menunjukkan bahwa hubungan antara *Regression Studentized Residual* dan *Regression Standardized Predicted Value* terlihat titik-titik (*point-point*) menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi derajat kemandirian fiskal berdasarkan masukan variabel independennya (Lampiran 7 – 13). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.2 sebagai berikut :

**Gambar 5.2**  
**Uji Heteroskedastisitas**



Selain pengujian dengan menggunakan metode grafik *scatterplot* pada penelitian ini juga akan dilakukan pengujian ada tidaknya gejala heteroskedastisitas memakai Uji White. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas, dilakukan uji White Heteroskedasticity (*no cross term*).

Berdasarkan hasil estimasi (*no cross term*) dapat disimpulkan bahwa menolak hipotesis yang menyatakan ada masalah heteroskedastisitas dalam model empiris yang digunakan. Hal ini dibuktikan bahwa nilai observasi  $R^2$  adalah 20,59 dengan *degree of freedom* 14, hasilnya masih lebih kecil dibandingkan dengan  $\chi^2$  tabel (14) dengan tingkat kepercayaan  $\alpha = 5\%$  (26,12). Dengan demikian, hasil uji dengan menggunakan uji White tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas dalam model empiris yang digunakan (Lampiran 7 – 14).

### 5.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan uji *Durbin Watson (DW)*. Dari regresi diperoleh angka DW sebesar 2,807. Karena model persamaan yang digunakan mempunyai variabel lag, maka uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan statistik  $h$  seperti yang disarankan Durbin Watson.

$$H = \left[ 1 - 0,5 (2,807) \right] \sqrt{\frac{24}{1 - 24 (0,005)}} = -0,23$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut ternyata nilai  $h$  terletak antara  $-1,96$  dan  $1,96$  atau  $-1,96 < h < 1,96$ . Hal ini berarti dengan derajat kepercayaan  $5\%$  tidak dapat menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi (positif atau negatif) dalam model.

### 5.3.4 Uji Normalitas

Proses uji normalitas data juga dilakukan dengan memperhatikan penyebaran data (titik) pada *Normal P-Plot of Regression Standardized Residual* dari variabel terikat. Persyaratan dari uji normalitas data adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka

model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/ atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Berdasarkan hasil pengolahan data maka didapatkan hasil bahwa semua data berdistribusi secara normal dan tidak terjadi penyimpangan, sehingga data yang dikumpulkan dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan metode pada bab sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan sebaran data yang menyebar disekitar garis diagonal pada "*Normal P-Plot of Regresion Standardized Residual*" (Lampiran 7 – 17).

Selain itu proses uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model empiris yang digunakan berdistribusi normal (Lampiran 7 – 17).

Berdasarkan hasil uji J - B terlihat bahwa nilai J-B hitung < dari nilai  $\chi^2$  tabel (dari *probability*-nya). Dengan demikian model empiris yang digunakan memiliki residual atau faktor pengganggu yang berdistribusi secara normal.

#### **5.4. Pengujian Goodness of Fit Model**

Ketepatan suatu fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fit*-nya. Uji ini meliputi pengujian secara individual, pengujian secara serentak dan koefisien determinasi.

##### **5.4.1 Pengujian Secara Individual**

Hasil uji signifikansi secara individual pada model PAM menunjukkan bahwa derajat kepercayaan 5 % sebagaimana terlihat dari hasil regresi pada tabel 5.2 ternyata dari 7 tujuh variabel yang ada pada model semuanya secara statistik

signifikan mempengaruhi derajat kemandirian fiskal di Kabupaten Banjarnegara.

Penentuan t-tabel menggunakan ketentuan tingkat signifikansi 5 persen (0,05 : 2) dengan  $df = n - k$  didapatkan nilai t-tabel sebesar 1,740. Sedangkan t-hitung dari hasil output komputer melalui program *SPSS 10.0* disajikan dalam tabel 5.5 di bawah ini :

**Tabel 5.5**  
**Nilai t-hitung**

| Variabel     | t-hitung | t-tabel |
|--------------|----------|---------|
| $\ln Y_{kt}$ | 19,977   | 1,740   |
| $Tan_t$      | 16,491   | 1,740   |
| $Ind_t$      | 2,676    | 1,740   |
| $Dag_t$      | -11,840  | -1,740  |
| $Jasa_t$     | 26,877   | 1,740   |
| $G_t$        | -11,742  | -1,740  |

Melihat nilai t-hitung yang kemudian diperbandingkan nilai t-tabel, maka dapat dikatakan bahwa secara individual masing-masing variabel bebas secara statistik signifikan berpengaruh pada tingkat alfa 5 persen. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Banjarnegara diduga berpengaruh dan berhubungan positif terhadap DKF Kabupaten Banjarnegara dapat diterima.

Kemudian hipotesis yang menyatakan bahwa pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan seperti sektor pertanian; sektor industri; sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa diduga berpengaruh dan berhubungan positif terhadap DKF Kabupaten Banjarnegara juga dapat diterima walaupun pada sektor perdagangan, hotel dan restoran berpengaruh dan berhubungan negatif. Selanjutnya hipotesis yang menyatakan bantuan pemerintah pusat diduga

berpengaruh dan berhubungan negatif atau tidak mampu memandirikan keuangan daerah Kabupaten Banjarnegara juga dapat diterima.

#### 5.4.2 Pengujian Secara Serentak

Uji F digunakan untuk melihat bagaimana variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Pada persamaan nilai uji F adalah 267,419 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian variabel independen pada model persamaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap derajat kemandirian fiskal Kabupaten Banjarnegara.

#### 5.4.3 Koefisien Determinan

Hasil regresi PAM menunjukkan koefisien determinasi (adjusted  $R^2$ ) yang meyakinkan yaitu sebesar 0,992. Ini berarti 99,2 % variasi derajat kemandirian fiskal Kabupaten Banjarnegara mampu dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen dalam model, sedangkan sisanya 0,8 % diterangkan oleh variabel lain di luar model.

#### 5.5. Pembahasan

Berdasarkan nilai koefisien jangka pendek dari persamaan regresi yang dihasilkan di atas kemudian dihitung koefisien jangka panjang dengan rumus berikut :

$$\ln Y_{k_t} = \beta_1 / (1 - \beta_7)$$

$$\text{Tan}_t = \beta_2 / (1 - \beta_7)$$

$$\text{Ind}_t = \beta_3 / (1 - \beta_7)$$

$$\text{Dag}_t = \beta_4 / (1 - \beta_7)$$

$$\text{Jasa}_t = \beta_5 / (1 - \beta_7)$$

$$G_t = \beta_6 / (1 - \beta_7)$$

Dari rumus di atas diperoleh koefisien regresi jangka panjang sebagaimana tertera dalam tabel 5.6 sebagai berikut :

**Tabel 5.6**  
**Hasil Estimasi Parameter Pertumbuhan Jangka Panjang**

| Variabel     | Elastisitas Jangka Pendek | Elastisitas jangka Panjang |
|--------------|---------------------------|----------------------------|
| $\ln Y_{kt}$ | 0,162                     | 0,182                      |
| $Tan_t$      | 0,011                     | 0,012                      |
| $Ind_t$      | 0,0008                    | 0,0009                     |
| $Dag_t$      | -0,0038                   | -0,0043                    |
| $Jasa_t$     | 0,011                     | 0,012                      |
| $G_t$        | -0,183                    | -0,206                     |

Pada penelitian ini model PAM dapat dijadikan penaksir untuk mengamati seberapa besar pengaruh variabel pendapatan per kapita, pertumbuhan sektor pertanian; pertumbuhan sektor industri; pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran; pertumbuhan sektor jasa-jasa serta bantuan dari pemerintah pusat terhadap derajat kemandirian fiskal Kabupaten Banjarnegara. Dengan demikian dapat dihitung pula koefisien jangka panjang PAM berturut-turut pada variabel pendapatan per kapita; pertumbuhan sektor pertanian; pertumbuhan sektor industri; pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran; pertumbuhan sektor jasa dan bantuan dari pemerintah pusat adalah : 0,182, 0,012, 0,0009, -0,0043, 0,012 dan -0,206. Hasil tersebut diperoleh/ dihitung dari koefisien jangka pendek dibagi 1 - koefisien penyesuaian sehingga fungsi derajat kemandirian fiskal jangka panjang menjadi :

$$DKF_t = -1,940 + 0,182 \ln Y_{kt} + 0,012 Tan_t + 0,0009 Ind_t - 0,0043 Dag_t \\ + 0,012 Jasa_t - 0,206 G_t$$

### **5.5.1 Pengaruh pendapatan per kapita terhadap derajat kemandirian fiskal**

Pendapatan per kapita ternyata mempunyai pengaruh dan berhubungan positif terhadap derajat kemandirian fiskal baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Koefisien regresi dan elastisitas sebesar 0,162 dalam jangka pendek menunjukkan bahwa dengan naiknya pendapatan per kapita sebesar 1 persen, *ceteris paribus* akan menaikkan derajat kemandirian fiskal sebesar 0,162 persen. Sedangkan dalam jangka panjang dimana koefisien regresi sebesar 0,182 berarti kenaikan pendapatan per kapita sebesar 1 persen akan menaikkan derajat kemandirian fiskal sebesar 0,182 persen.

### **5.5.2 Pengaruh pertumbuhan sektor pertanian terhadap derajat kemandirian fiskal**

Dalam jangka pendek, pengaruh pertumbuhan sektor pertanian terhadap derajat kemandirian fiskal adalah positif. Artinya semakin besar pertumbuhan sektor pertanian maka derajat kemandirian fiskal semakin tinggi dan sebaliknya. Koefisien regresi jangka pendek sebesar 0,011 memberi indikasi bahwa bahwa elastisitas pertumbuhan sektor pertanian terhadap derajat kemandirian fiskal bersifat elastis. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap tetap (*ceteris paribus*), maka kenaikan yang tercermin dalam pertumbuhan sektor pertanian sebesar 1 persen akan mengakibatkan peningkatan derajat kemandirian fiskal sebesar 0,011 persen.

Dalam jangka panjang, elastisitas pertumbuhan sektor pertanian terhadap derajat kemandirian fiskal 0,012. Artinya dalam jangka panjang kenaikan pertumbuhan sektor pertanian sebesar 1 persen akan menaikkan derajat

kemandirian fiskal sebesar 0,012 persen.

### **5.5.3 Pengaruh pertumbuhan sektor industri terhadap derajat kemandirian fiskal**

Koefisien jangka pendek variabel ini positif pada angka 0,0008. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata pertumbuhan sektor industri berpengaruh secara positif terhadap derajat kemandirian fiskal. Setiap 1 persen kenaikan pertumbuhan sektor industri bisa menaikkan derajat kemandirian fiskal sebesar 0,0008 persen dengan menganggap variabel lainnya konstan.

Koefisien jangka panjang variabel pertumbuhan sektor industri sebesar 0,0009. Hal ini berarti untuk beberapa tahun kedepan tingkat pertumbuhan sektor industri akan menghasilkan pertumbuhan yang positif yang berarti akan meningkatkan derajat kemandirian fiskal kabupaten Banjarnegara sebesar 0,0009 persen.

### **5.5.4 Pengaruh pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap derajat kemandirian fiskal**

Koefisien jangka pendek pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar -0,0038. Ini berarti jika pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran naik sebesar 1 persen *ceteris paribus*, maka derajat kemandirian fiskal akan mengalami penurunan sebesar 0,0038 persen dan sebaliknya.

Koefisien jangka panjang sebesar -0,0043 menunjukkan bahwa dalam jangka panjang perubahan pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran berpengaruh terhadap derajat kemandirian fiskal yakni kenaikan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1 persen akan menurunkan derajat

kemandirian fiskal sebesar 0,0043 persen. Hal ini kemungkinan disebabkan perolehan hasil dari sektor ini dibelanjakan/ diinvestasikan keluar, sehingga pendapatan yang seharusnya masuk di kabupaten Banjarnegara justru diterima oleh daerah lain.

#### **5.5.5 Pengaruh pertumbuhan sektor jasa-jasa terhadap derajat kemandirian fiskal**

Dalam jangka pendek, pengaruh pertumbuhan sektor jasa-jasa terhadap derajat kemandirian fiskal adalah positif. Artinya semakin besar pertumbuhan sektor jasa-jasa maka derajat kemandirian fiskal semakin tinggi dan sebaliknya. Koefisien regresi jangka pendek sebesar 0,011 memberi indikasi bahwa bahwa elastisitas pertumbuhan sektor jasa-jasa terhadap derajat kemandirian fiskal bersifat elastis. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap tetap (*ceteris paribus*), maka kenaikan yang tercermin dalam pertumbuhan sektor jasa-jasa sebesar 1 persen akan mengakibatkan peningkatan derajat kemandirian fiskal sebesar 0,011 persen.

Dalam jangka panjang, elastisitas pertumbuhan sektor jasa-jasa terhadap derajat kemandirian fiskal masih bersifat elastis 0,012. Artinya dalam jangka panjang kenaikan pertumbuhan sektor jasa-jasa sebesar 1 persen akan menaikkan derajat kemandirian fiskal sebesar 0,012 persen.

#### **5.5.6 Pengaruh bantuan dari pemerintah pusat terhadap derajat kemandirian fiskal**

Dalam jangka pendek, pengaruh bantuan dari pemerintah pusat terhadap derajat kemandirian fiskal adalah negatif. Artinya semakin besar bantuan dari

pemerintah pusat maka derajat kemandirian fiskal semakin rendah dan sebaliknya. Koefisien regresi jangka pendek sebesar  $-0,183$  memberi indikasi bahwa bahwa elastisitas bantuan dari pemerintah pusat terhadap derajat kemandirian fiskal bersifat inelastis. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap tetap (*ceteris paribus*), maka kenaikan yang tercermin dalam bantuan dari pemerintah pusat sebesar 1 persen akan mengakibatkan penurunan derajat kemandirian fiskal sebesar  $0,183$  persen.

Dalam jangka panjang, elastisitas bantuan dari pemerintah pusat terhadap derajat kemandirian fiskal sebesar  $-0,206$ . Artinya dalam jangka panjang kenaikan bantuan dari pemerintah pusat sebesar 1 persen akan menurunkan derajat kemandirian fiskal sebesar  $0,206$  persen.

#### 5.5.7 Interpretasi Koefisien Penyesuaian

Dari persamaan hasil estimasi diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel  $Y_{t-1}$  adalah  $\beta_7 = 0,110$ , dengan demikian koefisien penyesuaian dapat diduga yaitu  $\delta = 1 - \beta_7 = 1 - 0,110 = 0,890$ . Besaran  $\delta = 0,890$  mempunyai makna bahwa sekitar 89 % dari selisih atau penyimpangan atau ketidakcocokan antara derajat kemandirian fiskal tahun sebelumnya dan derajat kemandirian fiskal sekarang dihilangkan dalam tahun itu atau pada periode waktu  $t$ . Dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap tetap (*ceteris paribus*).

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 24 tahun (1977/1978 s/d 2000) disimpulkan bahwa :
  - a). Untuk proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah (TPD) diperoleh hasil rata-rata sebesar 16,41 %, sehingga derajat desentralisasi fiskal dinyatakan *kurang*.
  - b). Untuk proporsi bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) terhadap TPD diperoleh hasil rata-rata sebesar 9,83 % sehingga derajat desentralisasi fiskal dinyatakan *sangat kurang*.
  - c). Untuk proporsi sumbangan dan bantuan (S/B) terhadap TPD diperoleh hasil rata-rata sebesar 74,21 %. Hal ini menunjukkan 25,79 % merupakan komponen lain diluar sumbangan dan bantuan yang berasal dari pusat, sehingga derajat desentralisasi fiskal dinyatakan cukup.
2. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara dalam kesiapannya menghadapi otonomi daerah ditinjau dari derajat desentralisasi fiskal dinilai masih kurang, atau dapat dinyatakan bahwa tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. Hal ini ditandai dari

proporsi S/B terhadap TPD yang relatif semakin besar. Sebaliknya kontribusi PAD maupun BHPBP terhadap TPD yang masih sangat rendah.

3. Dari hasil analisis model Partial Adjustment Model (PAM) terhadap variabel-variabel yang diteliti, diperoleh bahwa :
  - a). Pendapatan per kapita mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap DKF Kabupaten Banjarnegara dengan elastisitas jangka pendek dan jangka panjang sebesar 0,162 dan 0,182.
  - b). Pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap DKF Kabupaten Banjarnegara dengan elastisitas jangka pendek dan jangka panjang sebesar 0,011 dan 0,012.
  - c). Pertumbuhan sektor industri mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap DKF Kabupaten Banjarnegara dengan elastisitas jangka pendek dan jangka panjang sebesar 0,0008 dan 0,0009.
  - d). Pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap DKF Kabupaten Banjarnegara dengan elastisitas jangka pendek dan jangka panjang sebesar -0,0038 dan -0,0043.
  - e). Pertumbuhan sektor jasa-jasa mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap DKF Kabupaten Banjarnegara dengan elastisitas jangka pendek dan jangka panjang sebesar 0,011 dan 0,012.
  - f). Bantuan pemerintah pusat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap DKF Kabupaten Banjarnegara dengan elastisitas jangka pendek dan jangka panjang sebesar -0,183 dan -0,206.

## 6.2 SARAN

Seirama dengan kesimpulan beberapa implikasi penting dari temuan studi di Kabupaten Banjarnegara, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a). Terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi mengingat hal ini merupakan faktor yang penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
- b). Terus berupaya meningkatkan penerimaan anggaran melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, menggunakan anggaran secara efisien, serta secara bertahap mengurangi ketergantungan fiskal dari pemerintah pusat.

## DAFTAR REFERENSI

- Anto Dayan, 1986, *Pengantar Metode Statistik II*, LP3ES, Jakarta.
- Aswarodi, 2001, *Analisis Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebelum dan Setelah Pemberlakuan UU No. 25 Tahun 1999 di Kabupaten Lampung Selatan*, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri RI dan Fisipol UGM 1991 "Pengukuran Kemampuan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertang Jawab", Jakarta.
- Devas, Nick, Brian, Biden, Anne Both, Kenneth Dovey, Roy Kelly, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, (terjemahan, Masri Maris) penerbit UI, Jakarta.
- Didir M.P. Pontjowinoto, 1991, *Alternatif Reformasi Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, Prisma, Vol. XX, No. 8, hal 31 - 42
- Elia Radianto, 1997, *Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II Suatu Studi di Maluku*, Prisma, nomor 3, 1997, hal. . 39 - 50.
- E. Koswara, 1999, *Menyongsong Kebijaksanaan dan Implementasi Otonomi Luas dan Bertanggungjawab menurut UU No. 22 Tahun 1999*, Makalah Seminar ISEI Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Repelita VII, Yogyakarta.
- FX. Sugiyanto, 2000, *Kemandirian dan Otonomi Daerah*, Media Ekonomi dan Bisnis, Vol. XII, No. 1, hal 1 - 7.
- Gito Sudarmo, 1989, *Pengantar Bisnis*, Edisi Kedua PBFE, Jakarta.
- Gujarati Damodar, 1995, *Basic Econometrics*, third edition, McGraw Hill Inc., Singapore.
- Guritno Mangkoesobroto, 1993, *Ekonomi Publik*, Edisi 3, BPFE, UGM Yogyakarta.
- Hanke dan Reitsch, 1998, *Business Forecasting*, sixth edition, London Prentice Hall International Ltd,
- Ibnu Syamsi, 1994, *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.

- Jaka Sriyana, 1999, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Reformasi Perpajakan dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 4, No. 1, hal 102 – 113.
- J. Supranto, 1983, *Ekonometrik*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Keneeth Davey, 1986, *Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga* (terjemahan, Amanullah dkk.) Universitas Indonesia, Press, Jakarta.
- M. Irsad dan Sri Sudarsi, 2001, *Otonomi Daerah : beberapa Masalah Dalam Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Gema Stikubank, Edisi 33, No. 1, hal 1 – 13.
- Mardiasmo, 1999, *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Publik*, PAU Studi Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2001, *Perpajakan*, Edisi Kesembilan, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo dan Makhfatih, 2000, *Penghitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang*, PAU Studi Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Miyasto, 2002, *Sambutan Kepala BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah pada Rakorbang di Kabupaten Wonogiri*, tanggal 12 Agustus 2002
- Mudrajat Kuncoro, 1995, *Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, Prisma nomor. 14, 1995, hal. 3 – 17.
- Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave, 1989, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, (terjemahan Alfonsus Sirait, dkk.), Edisi kelima, penerbit Erlangga, Jakarta.
- Nasyith Majidi, 1991, *Desentralisasi Klasifikasi Daerah Untuk Alokasi Subsidi*, Prisma, Edisi 20, No. 8, hal 3 – 16.
- Rustian Kamaluddin, 1983, *Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah*, Ghalia Indonesia, cetakan pertama, Jakarta.
- Nurimansjah Hasibuan, 1991, *Otonomi dan Desentralisasi Keuangan Daerah*, Prisma, Edisi 20, No. 8, hal 18 – 29.
- Sadono Sukirno, 1994, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Edisi ke-2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- , 1999, *Makroekonomi Modern*, Edisi ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Singgih Santoso, 2000, *SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional*, Edisi ke-2, PT. Elex Media Komputindo Gramedia Jakarta, Jakarta.
- , 2000, *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*, PT. Elex Media Komputindo Gramedia Jakarta, Jakarta.
- Soetrisno P.H., 1983, *Dasar-Dasar Kebijakan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal*, BPFE, Yogyakarta.
- Sukanto Reksohadiprodjo, 1999, *Ekonomika Publik*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Suparmoko, 1987, *Ilmu Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, PBF, Yogyakarta.
- Soedjono, 2000, *Strategi Sumber Daya Manusia Untuk Pengendalian Jumlah Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Rutin Dalam Rangka Otonomi Daerah*, *Ekuitas*, Vol. 4, No. 4, hal 233 – 256.
- Thamrin Simanjuntak, 2001, *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah*, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Todaro, M.P., 2000, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi ke tujuh, terjemahan, penerbit Erlangga, Jakarta.
- Turtiantoro, 2000, *Otonomi Daerah Dalam Prespektif Administrasi Pembangunan*, *Media Ekonomi dan Bisnis*, Vol. XII, No. 1, hal 25 – 31.
- Yuliati, 2001, *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah*, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Yuswar Z.B. dan Mulyadi S., 2003, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Edisi dan Cetakan pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , *Modul Pelatihan Ekonometrika Dasar*, 2000.
- , Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*.
- , Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*.

-----, Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang *Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 – 2004*.

-----, Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang direvisi kembali melalui Undang-Undang No. 34 Tahun 2000*.

-----, Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.